MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayan telah menetapkan Peraturan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2015-2019;

b. bahwa untuk mengikuti kebutuhan Organisasi perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2015-2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan

Manusia dan Kebudayaan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2015-2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 4700);

4. Peraturan Presiden 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);

5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2015-2019.

Pasal I

Lampiran Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1123) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal II

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Mei 2018

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PUAN MAHARANI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1275

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Y. B. Satya Sananugraha

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2015-2019

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2015-2019

BAB I
PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

1. Kondisi Nasional Periode 2009-2014

Pedoman Perencanaan Pembangunan Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. Visi RPJPN 2005-2025 adalah Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur. Salah satu perwujudan dari visi tersebut adalah ditandai dengan meningkatnya daya saing bangsa Indonesia.

Pembangunan Nasional telah memberikan capaian pada berbagai aspek kehidupan bangsa. Pada tahun 2014, perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 5,1 persen, meningkat dari tahun 2009 sebesar 4,6 persen. Pertumbuhan ekonomi ini diikuti dengan inflasi yang terkendali, suku bunga yang stabil, dan nilai tukar yang menguat.

Capaian indikator kesejahteraan rakyat ditandai dengan pendapatan per kapita US$4.000 pada tahun 2014. *Human Development Index* (HDI) Indonesia 0,732 pada tahun 2013, yang berarti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi bangsa Indonesia membaik. Jika pada tahun 2009 tingkat

kemiskinan 16,7 persen, maka pada tahun 2013 menjadi 11,96 persen. Sementara tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2009 sebesar 8,1 persen, maka pada tahun 2014 menjadi 5,62 persen.

Dibidang pelayanan kesehatan khususnya kesehatan ibu dan anak, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), capaian angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup adalah 32 (2012), dan hal ini tidak diimbangi dengan angka kematian ibu melahirkan yang masih tinggi, dimana angka kematian ibu melahirkan 228 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007 melonjak menjadi 359 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2012 (SDKI tahun 2012). Berdasarkan data dimaksud, maka hasil tersebut masih jauh dari target MDG's, yaitu 100 per 100.000 kelahiran di tahun 2015.

2. Capaian Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat periode 2009-2014

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kemenko Kesra) memperoleh mandat membantu Presiden Republik Indonesia dalam mengoordinasikan perencanaan dan penyusunan kebijakan, serta menyinkronkan pelaksanaan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat. Kemenko Kesra melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian untuk sinergi pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat yang ditetapkan kedalam tiga pilarutama, yaitu: a) penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran, b) pengembangan investasi sumber daya manusia (SDM) dan kemasyarakatan, serta c) penanggulangan, antisipasi, dan tanggap cepat gangguan kesejahteraan rakyat.

a. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran

Sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014, dengan dilaksanakannya program-program penanggulangan kemiskinan seperti beras miskin (Raskin), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Siswa Miskin (BSM), PNPM dengan berbagai sasaran dan klasifikasi, dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diharapkan dapat langsung menyentuh permasalahan di bidang kemiskinan. Angka kemiskinan nasional secara absolut pada tahun 2009 sebesar 14,1 persen dan menjadi 8-10 persen pada tahun 2014.

Secara umum, hasil analisis data dari BPS menyatakan bahwa tingkat kemiskinan pada periode 2009 hingga Maret 2014 mengalami

penurunan, kecuali pada September 2013 mengalami kenaikan dari jumlah maupun prosentasenya dibandingkan enam bulan sebelumnya. Kenaikan jumlah penduduk miskin tersebut diakibatkan oleh kenaikan harga barang pokok dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

b. Pengembangan Investasi SDM dan Kemasyarakatan

Pengembangan dan investasi SDM dan Kemasyarakatan adalah pilar kedua yang sangat pentingbagi keseluruhan pembangunan Indonesia. Realisasi investasi SDM berdasarkan sasaran strategis pilar II ditunjukkan Tabel 1.1.

Tabel 1.1.Target dan Realisasi Pilar II Investasi SDM Tahun 2010–2014

SASARAN STRATEGIS	TAHUN	TARGET	REALISASI
Pengembangan InvestasiSumber Daya Manusia (SDM) dan Masyarakat	2009-2010	Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 72,27	72,27
	2010-2011	Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 72,77	72,77
	2011-2012	Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 73,10	73,29
	2012-2013	Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 73,60	73,79

Kemenko Kesra melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pada program peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diupayakan dengan program bidang kesehatan dan pendidikan. Pada bidang kesehatan penekanan program pada sasaran penurunan tingkat Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI), koordinasi penanggulangan penyakit degeneratif, dan *kardiovaskular* melalui kampanye hidup sehat-seimbang.

Selama periode 2010-2014, peningkatan angka IPM secara nasional meningkat sebesar 0,5 persen. Menurut UNDP, IPM diberbagai daerah di Indonesia cenderung membaik pada periode RPJMN 2010-2014. Berdasarkan lokasi daerah perkotaan atau perdesaan, IPM masih rendah di daerah-daerah, khususnya di luar Jawa, Sumatera, dan Bali.

Pada tahun 2011, IPM kawasan Sumatera, Jawa, dan Bali pada umumnya berada di atas rata-rata nasional (72,77). Sedangkan IPM kawasan di luar Jawa, Sumatera, dan Bali (Indonesia Tengah dan Timur) pada umumnya di bawah rata-rata nasional, kecuali Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Utara. Sementara itu, daerah tertinggal seperti NTT, NTB, dan Papua juga mengalami kemajuan tingkat IPM yang lebih pesat dibanding daerah lainnya.

c. Penanggulangan, Antisipasi, dan Tanggap Cepat Gangguan Kesra

Berdasarkan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilakukan Kemenko Kesra, beberapa hal telah dicapai selama periode 2010-2014 dalam penanggulangan, antisipasi, dan tanggap cepat gangguan kesejahteraan rakyat.

Pada tahun 2010, pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya 120 BPBD di tingkat kab/kota dan 32 BPBD di tingkat Provinsi menjadi 341 BPBD di tingkat kab/kota dan 32 BPBD di tingkat provinsi; Telah dipasang *buoy* sebanyak 12 buah yang berfungsi sebagai peringatan dini bagi masyarakat terhadap ancaman tsunami; Penyusunan draf Program Nasional Penanggulangan Kerawanan Sosial (PNPKS) dengan melibatkan Kementerian/Lembaga (K/L), LSM, dan perguruan tinggi; serta Penanganan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKIB) dan Warga Negara Indonesia *Overstayers* (WNIO) (jumlah TKI bermasalah yang dipulangkan ke Indonesia) melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No. 06/Kep/Menko/Kesra tentang Satuan Tugas Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah serta pekerja migran Indonesia bermasalah sosial dan keluarganya dari Malaysia dan negara lainnya

Pada tahun 2011, Indonesia mendapat kepercayaan di tingkat ASEAN untukmembentuk *ASEAN Coordinating Center For Humanitarian Assistance on Disaster Management* (AHA CENTER) dan Indonesia disepakati menjadi ketua di tingkat ASEAN.

Pada tahun 2013 koordinasi dan sinkronisasi yang dilakukan telah menurunkan jumlah titik *hot spot* dilokasi-lokasi yang berpotensi terjadinya kebakaran hutan, seperti di pulau Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi sebesar 19.353 titik. Selain itu dalam penanganan WNIO, telah dipulangkan dari Jeddah pada masa amnesti menggunakan

empty flight hajj Garuda Indonesia berjumlah 714 orang, diantaranya 458 perempuan dan 100 anak.

Pencapaian ketiga pilar program tersebut telah dilaksanakan melalui koordinasi dan sinkronisasi kelembagaan dari berbagai sektor. Koordinasi dan sinkronisasi yang dimaksud adalah koordinasi di bidang lingkungan hidup dan kerawanan sosial, perlindungan sosial dan perumahan rakyat, kesehatan, kependudukan, dan keluarga berencana, pendidikan dan agama, kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga, pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan anak, penanggulangan kemiskinan, serta pemberdayaan masyarakat.

Koordinasi dan sinkronisasi di bidang koordinasi lingkungan hidup dan kerawanan sosial telah tersusun beberapa kebijakan. Kemenko Kesra telah menyelesaikan Dokumen Prosedur Operasi Standar Nasional Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Posnas Karhutla) sebagai upaya konkrit pencegahan terjadinya kabut asap yang sering mengganggu hubungan antar negara.

Koordinasi dan sinkronisasi di bidang Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat, meliputi program beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (Raskin), program jaminan sosial, program penyandang cacat dan disabilitas lansia, serta program perumahan rakyat. Program Raskin telah memberikan kontribusi sebesar 39,5 persen dari kebutuhan pangan Rumah Tangga Sasaran (RTS) dan komplementer dengan program pemerintah lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagai salah satu program prioritas telah dilaksanakan pada tahun 2014, melalui pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) di Indonesia dengan diresmikannya BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Koordinasi dan sinkronisasi di bidang kesehatan telah diterbitkan Peraturan Presiden tentang Komisi Penanggulangan Nasional HIV/AIDS, Komisi Nasional *Zoonosis*, Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dalam rangka 1.000 hari pertama kehidupan, percepatan pelaksanaan pembangunan air minum dan sanitasi, *grand design* kependudukan dan ketenagaan kesehatan. Kemudian Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesra tentang jejaring pangan terpadu, *center comunication forum* (CCF), tim rencana aksi kesehatan dan lingkungan, tim teknis gerakan nasional percepatan perbaikan gizi.

Koordinasi dan sinkronisasi di bidang Pendidikandan Agamaterealisasi dengan terbitnya Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No.15/Kep/Menko/Kesra/VI/2002 tanggal 19 Juni 2002 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Nasional Pendidikan Untuk Semua (Forkonas PUS). Kemenko Kesra juga melakukan program konkrit Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun, seperti menyediakan beasiswa bagi siswa miskin, BOS, dan *block grant* sesuai kebutuhan sekolah.

Koordinasi dan sinkronisasi di bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga adalah menyelenggarakan kegiatan *sail* yangdiselenggarakan setiap tahunnya sejak tahun 2009 di Bunaken Sulawesi Utara, Pekan Produk Kreatif Indonesia, Penganugerahan Puncak Budaya Kreatif (Baksyacaraka), Pengelolaan Delapan Warisan Budaya dan Alam Dunia, serta enam warisan budaya yang masuk Daftar Representatif Budaya dan Benda Warisan Manusia UNESCO. Di bidang olahraga Kemenko Kesra juga mengoordinasikan penyelenggaraan SEA Games 2011, PON 2012, dan *Islamic Solidarity Games* 2013. Sedangkan di bidang pemuda melaksanakan Raimuna Nasional 2013 Gerakan Pramuka dan pengembangan Taman Rekreasi Wiladatika Cibubur.

Koordinasi dan sinkronisasi di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak ditandai dengan terbitnya Permenko Kesra Nomor 01 Tahun 2013 tentang Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi dan Permenko kesra Nomor 06 Tahun 2013 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Pornografi. Selain itu, capaian dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan, antara lain Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan terhadap laki-laki di Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama berturut-turut sebesar 99,81 persen dan 105,69 persen pada tahun 2013, dan rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15 sampai 24 tahun telah mencapai 98,44 persen. Kemenko Kesra telah melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Anak pada tahun 2013 dengan mendorong diterbitkannya Perpres Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

Koordinasi dan sinkronisasi di bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan mendorong

terbitnya Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan melahirkan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Penyaluran KUR selama lima tahun (2009-2014), dimana realisasinya mendekati Rp 47 triliun dengan penerima kredit sebanyak 98 juta orang.

3. Aspirasi Masyarakat Terhadap Peran, Tugas, dan Fungsi Organisasi

Bidang kesejahteraan rakyat mempunyai peran strategis dalam pelaksanaan pembangunan manusia Indonesia dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa. Kualitas manusia sangat ditentukan antara lain terpenuhi atau tidaknya kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, dan kesehatan lingkungan.

Pembangunan manusia merupakan upaya untuk mengembangkan daya kemampuan Indonesia agar hidup sehat dan berumur panjang, berilmupengetahuan, kreatif, memiliki akses terhadap sumber daya untuk hidup layak, serta berperan aktif dalam penentuan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan dan pilihan hidupnya.

Secara keseluruhan upaya Kemenko Kesra dalam penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran, pengembangan investasiSDM dan kemasyarakatan, serta penanggulangan, antisipasi, dan tanggap cepat gangguan kesejahteraan rakyat menuai banyak kemajuan. Namun, masih terdapat beberapa ruang yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan rakyat.

Secara tidak langsung kondisi ekonomi makro dapat mempengaruhi upaya-upaya dalam penurunan kemiskinan dan pengurangan pengangguran. Oleh karena itu, upaya dalam pengendalian inflasi dan stabilitas harga bahan-bahan pokok perlu ditingkatkan agar pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan dapat berjalan efektif dan dampaknya dapat lebih terlihat. Dengan kondisi tersebut, pentingnya peran koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian sesuaitugas dan fungsi (Tusi) Kemenko dimasa mendatang perlu di implementasikan secara maksimal.

Dari sisi pembangunan manusia masih terdapat ketimpangan antar daerah, hal ini dibuktikan dengan capaian IPM di beberapa daerah yang masih berada di bawah capaian rata-rata IPM secara nasional khususnya di wilayah Indonesia Tengah dan Timur. Dengan demikian, khusus daerah-daerah dimana capaian IPM masih dibawah rata-rata nasional perlu

diperkuat dengan pembangunan secara berkelanjutan guna mendukung peningkatan kualitas manusianya, seperti pembangunan infrastruktur untuk mempermudah akses ekonomi, peningkatan pelayanan, dan kebutuhan dasar, yaitu pendidikan dan kesehatan.

Dalam pelaksanaan antisipasi dan penanganan kebencanaan peran dan partisipasi masyarakat menjadi sangat penting. Salah satu hambatan yang masih sering terjadi adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga barang publik yang menjadi kepentingan bersama. Sebagai contoh masih terjadi perusakan/pencurian sensor-sensor tsunami yang sejatinya diperlukan oleh masyarakat sendiri. Fakta tersebut memberikan gambaran perlunya sinkronisasi, yakni kebijakan antar lembaga untuk penguatan operasional yang melibatkan BMKG, BPPT, dan BIG sebagai penanggung jawab. Secara keseluruhan terdapat kebutuhan bahwa peningkatan mutu manusia tidaklah dapat dilepaskan dari konteks perbaikan lingkungan dan penguatan nilai-nilai dalam bentuk kebudayaan yang menunjang kemajuan perilaku bangsa secara keseluruhan. Selain kedua isu-isu kelembagaan tersebut, maka pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan Lembaga tidak dapat dilepaskan oleh efektivitas lembaga dalam memfasilitasi K/L yang menjadi mitra. Kemenko adalah kementerian yang memiliki tugas utama menyelaraskan pelaksanaan pembangunan yang dimandatkan oleh Presiden dan harus ditopang oleh kapasitas lembaga yang tercermin dari tiga unsur utama organisasi, yaitu Sumber Daya Manusia (SDM), Kelembagaan, dan Manajemen.

Peran SDM dalam melaksanakan kewenangan Kemenko memfasilitasi pembangunan akan lebih efektif dan produktif jika ditopang oleh kinerja manajemen dan akuntabilitas penggunaan anggaran yang tinggi. SDM yang kompeten dan ditunjang oleh manajemen sumber daya serta akuntabilitas penggunaan anggaran yang baik sebagai organisasi publik yang akan berkontribusi terhadap efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan.

Berdasarkan harapan dan aspirasi yang berkembang selama periode lima tahun sebelumnya (2010-2014), setidaknya terdapat tiga isu strategis yang perlu terus diperkuat dan dikembangkan dalam melaksanakan pembangunan lima tahun ke depan (2015-2019), yaitu:

a. Peningkatan kualitas peran koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pada upaya-upaya pembangunan kesejahteraan masyarakat, baik pada segi-segi sumber daya manusia maupun lingkungan dan kebudayaannya;

b. Peningkatan kualitas manusia, lingkungan, dan kebudayaan yang akan menjadi sasaran pembangunan sekaligus subyek para pelaku penghela pembangunan; dan
c. Peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan dalam mendukung peran koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pada upaya-upaya pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Ketiga isu tersebut mencerminkan peran-peran yang akan diperlukan Kemenko pada lima tahun ke depan.

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

1. Dinamika Lingkungan Internal

Lingkungan strategis internal adalah keseluruhan aspek atau komponen yang berkontribusi terhadap operasionalisasi program atau kegiatan Kemenko. Aspek-aspek tersebut akan memfasilitasi peran dan tugas dan fungsi Kemenko PMK dalam mengendalikan segala potensi terjadinya masalah atau kendala yang akan dihadapi dalam jangka waktu menengah selama lima tahun. Aspek-aspek atau komponen-komponen tersebut meliputi landasan atau legalitas peran, tugas,dan fungsi Kemenko, kelembagaan, SDM, dan manajemen.

a. Landasan Peraturan dan Kelembagaan

Dalam melaksanakan sistem pemerintahan Kementerian Koordinator berpedoman kepada kebijakan-kebijakan yang ada, baik berupa UU, PP, Perpres, maupun Permenko itu sendiri. Semenjak terbentuknya Kabinet Kerja telah terjadi perubahan nomenklatur Kementerian Koordinator yang semula Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat berganti menjadi KementerianKoordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Pembentukan Kemenko PMK berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2015.

Apabila dicermati, terdapat sedikit perubahan yang cukup signifikan terhadap peran,tugas, dan fungsi Kemenko PMK dibandingkan dengan peran, tugas, dan fungsi Kemenko Kesra. Perubahan tersebut berkonsekuensi terhadap restrukturisasi keseluruhan dalam menjalankan program dan kegiatan. Perbedaan landasan legal kelembagaan dapat dicermati pada Tabel 1.2.

Secara umum berdasarkan Perpres Nomor 24 Tahun 2010 dan Perpres Nomor 9 Tahun 2015, maka tugas Kemenko PMK adalah

membantu Presiden menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan masalah-masalah kesejahteraan masyarakat. Perbedaannya pada Perpres Nomor 24 Tahun 2010 secara definitif tidak disebutkan pengendalian sebagai tugas secara tersendiri, sedangkan pada Perpres Nomor 9 Tahun 2015 disebutkansecara tegas akan tugas pengendalian pada area atau isu pengembangan masyarakat tersebut. Selain itu, Perpres Nomor 24 Tahun 2010 menjelaskan bahwa substansi pengembangan kebijakan pada kesejahteraan rakyat. Sementara Perpres Nomor 9 Tahun 2015 menggarisbawahi arah kebijakan Kementerian Koordinator adalah pada bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Dalam konteks ini terminologi Kesejahteraan Rakyat beralih menjadi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Tabel 1.2. Perbandingan Substansi Tusi Kemenko Berdasarkan Perpres

TUSI	PERPRES 24 TAHUN 2010	PERPRES 9 TAHUN 2015
Tugas	Membantu Presiden dalam menyinkronkan dan mengoordinasikan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di	Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan

TUSI	PERPRES 24 TAHUN 2010	PERPRES 9 TAHUN 2015
Fungsi	a. Sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat; b. Koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat; c. Pengendalian penyelenggaraan urusan kementerian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b; d. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; e. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; dan f. Pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden.	a. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; b. Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; c. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; d. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; e. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koordinator

Kedua Perpres merinci fungsi Kemenko tetap pada koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pada perumusan, penetapan dan pelaksanaan yang terkait pembangunan masyarakat. Bila dicermati perbedaan fungsi saat ini dengan sebelumnya terletak pada fungsi koordinasi yang diletakkan secara bersama dengan sinkronisasi, sebagaimana tertulis pada Perpres Nomor 9 Tahun 2015.

b. SDM dan Manajemen

SDM aparatur Kemenko PMK mempunyai latar belakang keilmuan, pengalaman, pendidikan dan pelatihan terkait yang memadai dengan pembangunan kesejahteraan rakyat. Namun dari segi jumlah, SDM Kemenko PMK masih terbatas.

Tata kelola pemerintahan yang baik (*goodgovernance*) telah menjadi isusentral dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Kualitas tatakelola pemerintahan adalah prasyarat tercapainya sasaran pembangunan nasional, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Tingginya integritas aparatur Kemenko PMK dalam melaksanakan tugas dan fungsi bertanggung jawab dalam rangka mewujudkan *good governance.*

RPJMN 2015-2019 menjadi acuan bagi penyelenggara pemerintahan untuk lebih meningkatkan peran sertanya dalam pencapaian kinerja pembangunan di Indonesia. Kemenko PMK memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pencapaian target sejumlah indikator kinerja yang tertuang di RPJMN 2015-2019. Kemenko PMK merupakan kementerian yang mendapat mandat mengoordinasikan tentang pencapaian kualitas pembangunan manusia Indonesia, antara lain pengentasan kemiskinan (*poverty eradication*), ketahanan pangan dan nutrisi yang berkelanjutan (*food security and nutrition*), kesehatan termasuk air dan sanitasi, serta bagaimana masalah dan tantangan menjadi potensial dan memberikan dampak positif bagi pendidikan. Dengan demikian, dalam konteks perencanaan strategis periode 2015–2019, Kemenko PMK harus bisa memfasilitasi pemenuhan Indikator kinerja dalam RPJMN.

Selain itu, Kemenko PMK telah melakukan banyak kerjasama internasional (*international cooperations*), baik bilateral maupun multilateral di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, sehingga dengan terbukanya peluang kerja sama dapat meningkatkan kemampuan Kemenko PMK untuk melaksanakan tugas dan fungsi dengan optimal.

Penekanan perlunya pengendalian pada isu atau bidang PMK yang efektif menjadi salah satu semangat dalam Perpres Nomor 9 Tahun 2015. Kondisi tersebut membawa konsekuensi logis pada alasan penataan kembali kelembagaan, SDM,maupun manajemen. Kemenko PMK memiliki tugas penting mengolaborasikan bentuk koordinasi dan sinkronisasi K/L yang berada di bawah koordinasi bidang PMK untuk dapat menjalankan peran, tugas, dan fungsi masing-masing secara harmonis. Tugas dan fungsi Kemenko PMK tidak hanya sebatas koordinasi dan sinkronisasi, akan tetapi juga harus memiliki

kemampuan, kompetensi, dan kesanggupan menyelenggarakan pengendalian yang efektif dalam pelaksanaan kebijakan PMK.

2. Dinamika Lingkungan Eksternal

Lingkungan strategis eksternal adalah ruang dan media yang mempresentasikan dialektika dan interaksi antar keseluruhan subsistem, baik sosial budaya, lingkungan, teknologi, dan ekonomi, serta dinamika politik yang tumbuh dan berkembang saling mempengaruhi terhadap kehidupan masyarakat dan pembangunan nasional. Dalam perspektif pendekatan struktur-fungsionalis, maka gangguan atau kendala dari suatu sub sistem akan mengakibatkan subsistem lainnya terganggu dan mempengaruhi pencapaian tujuan. Keberadaan kondisi atau situasi tersebut harus dicermati dalam konteks Pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan nasional.

Salah satu kondisi dinamis yang saat ini berkembang adalah era desentralisasi dan otonomi daerah saat ini yang membuka peluang lebih luas untuk mempercepat pembangunan di daerah-daerah. Dengan kewenangan lebih besar yang diberikan kepada daerah untuk mengelola anggaran, maka Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang lebih besar untuk melaksanakan pembangunan. Dengan koordinasi dari Kemenko PMK, diharapkan program pro-rakyat dapat terselenggara lebih efektif dan efisien.

UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga memuat bahwa perkembangan kependudukan terdiri dari aspek kualitas, kuantitas, dan mobilitas penduduk, serta perencanaan dan wawasan kependudukan. Sedangkan pembangunan keluarga dimaksudkan untuk pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Salah satu prasyarat dalam pengembangan SDM adalah mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dengan pengendalian kuantitas penduduk melalui keluarga berencana; peningkatan kualitas penduduk melalui pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan kemandirian ekonomi.

Tantangan peningkatan kualitas penduduk meliputi: (a) lemahnya komitmen dan dukungan *stakeholder* terhadap program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), terkait kelembagaan serta perencanaan penganggaran; (b) di bidang kesehatan, perempuan belum mendapatkan haknya untuk mengatur dan menjaga

kesehatan reproduksi secara optimal. Hal ini terlihat dari tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) karena hamil, melahirkan, dan nifas. Berdasarkan SDKI tahun 2007 terdapat 228 kematian Ibu per 100.000 kelahiran. Angka ini meningkat menjadi 359/100.000 kelahiran pada tahun 2012 (SDKI tahun 2012), suatu angka kematian ibu yang masih jauh dari target MDGs sebesar 110 per 100.000 kelahiran pada tahun 2015; (c) Kualitas pelayanan KB (*supply side*) belum sesuai standar, yaitu berkaitan dengan

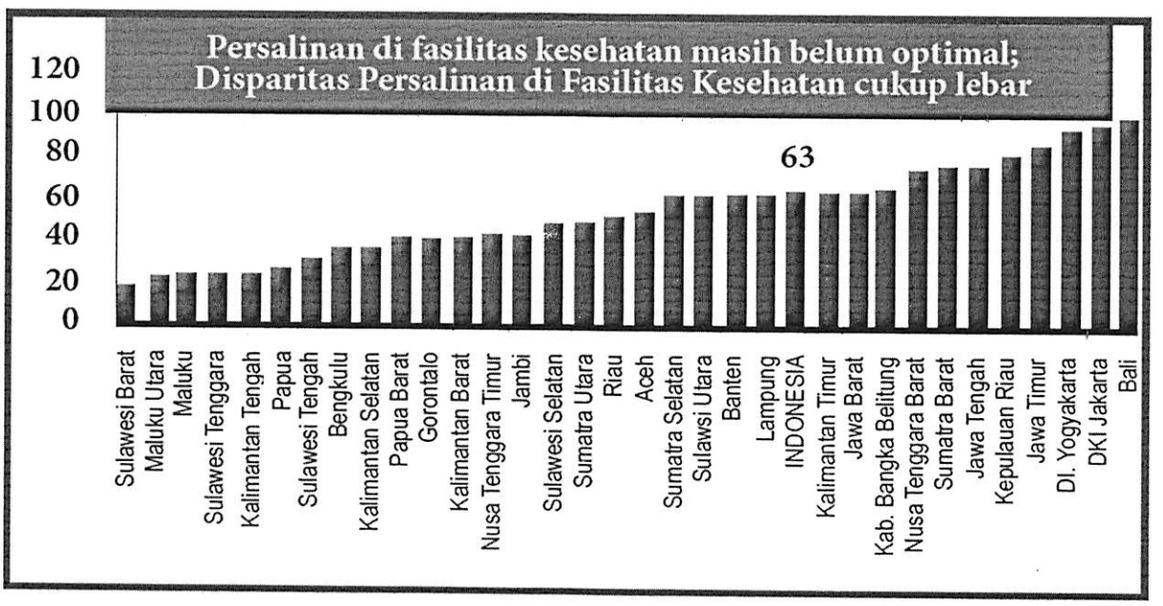

Sumber: RPJMN 2015-2019

Gambar 1. Disparitas Fasilitas Kesehatan Antar Provinsi di Indonesia

ketersediaan dan persebaran fasilitas kesehatan/klinik pelayanan KB dan fasilitas kesehatan untuk persalinan seperti terlihat pada Gambar 1.

Percepatan perbaikan gizi masyarakat menghadapi permasalahan yang sangat besar karena kekurangan gizi dan kelebihan gizi terjadi pada saat yang bersamaan pada seluruh kelompok umur. Kekurangan gizi yang diukur dengan *stunting* telah terjadi sejak anak lahir, dengan prevalensinya meningkat hingga anak berusia dua tahun dan terus terjadi hingga usia lima tahun. Masalah disparitas (perbedaan) gizi yang cukup tinggi antar provinsi dan antar kabupaten/kota menjadi tantangan yang perlu diselesaikan bersama oleh pemerintah di bawah koordinasi KemenkoPMK seperti terlihat pada Gambar 2.

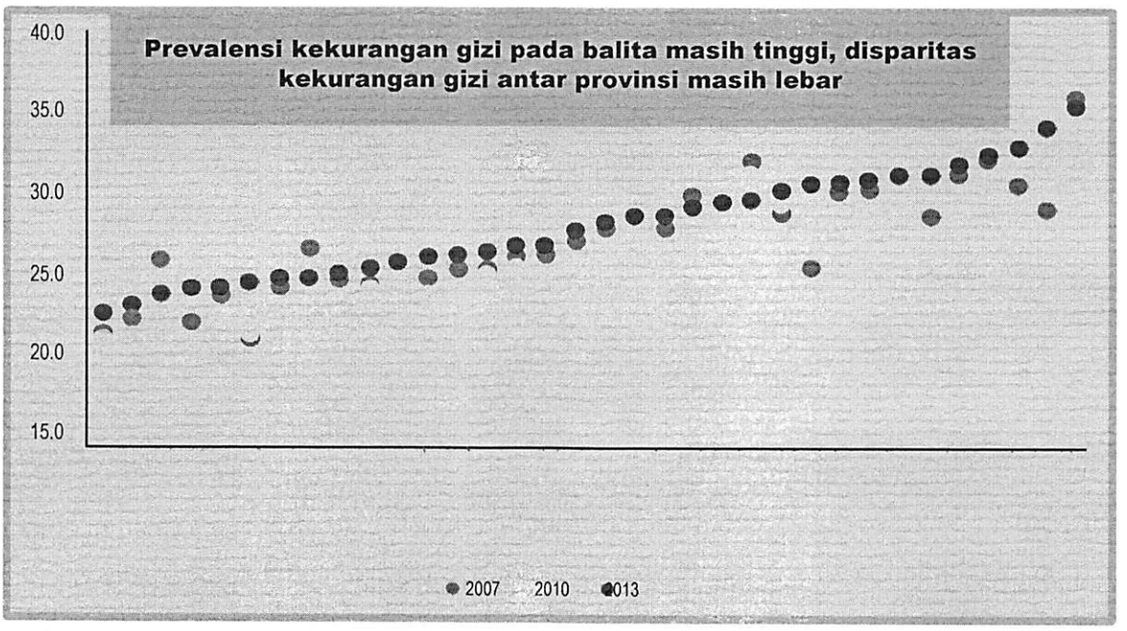

Sumber: RPJMN 2015-2019

Gambar 2.Disparitas Kekurangan Gizi Antar Provinsi di Indonesia

Permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan Pengarus-utamaan Gender (PUG) antara lain: (i) belum optimalnya fungsi koordinasi oleh Kemenko terkait PUG; (ii) masih terbatasnya jumlah dan kapasitas SDM yang dapat memfasilitasi K/L maupun pemerintahdaerah tentang PUG; (iii) belum optimalnya kerjasama pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam implementasi PUG; (iv) belum melembaganya penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah dalam penyusunan kebijakan dan rencana program dan kegiatan pembangunan; dan (v) masih kurangnya komitmen para pengambil keputusan di K/L maupun pemerintah daerah dalam pelaksanaan PUG.

Pembangunan karakter bangsa berdasarkan Pancasila dapat dilaksanakan melalui dua jalan yakni, pendidikan dan kebudayaan. Pada wilayah pendidikan, wadah yang dipandang tepat adalah melalui pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan pendidikan karakter berdasarkan Pancasila, yang bertujuan untuk membina akhlak mulia, budi pekerti luhur, memupuk jati diri, kepribadian Pancasila, dan identitas kebangsaan melalui proses pembelajaran di sekolah.

Dalam konteks pendidikan, Pelaksanaan Wajib Berlajar 12 Tahun ditujukan untuk pengentasan kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, seluruh anak

usia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Namun, kenyataannya pada tahun 2012 sebagian dari mereka, yaitu sekitar 2,12 persen anak usia 7-12 tahun dan 10,48 persen anak usia 13-15 tahun tidak bersekolah.

Dengan uraian permasalahan di atas, tantangan yang harus diatasi adalah meningkatkan pemerataan akses ke layanan pendidikan dengan memberikan peluang lebih besar bagi anak dari keluarga yang tidak mampu untuk menurunkan kesenjangan akses pendidikan antar daerah, antar status sosial ekonomi, dan antar jenis kelamin.

Pada wilayah kebudayaan, diakui bahwa pemahaman terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa menjadi landasan untuk memperkuat kebersamaan dan persatuan, toleransi, tenggang rasa, gotong royong, etos kerja, dan menciptakan kehidupan yang harmonis. Adapun permasalahan yang masih dihadapi antara lain: (a) adanya kecenderungan menurunnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari; (b) menurunnya kualitas penggunaan bahasa Indonesia dan rasa cinta terhadap produk dalam negeri; (c) rendahnya kesadaran akan keberagaman budaya, nilai-nilai kearifan lokal, dan penghormatan terhadap adat, tradisi, dan kepercayaan; (d) menurunnya daya juang dan budaya kerja (etos kerja) serta sikap tenggang rasa dan toleransi terhadap perbedaan yang dapat memicu terjadinya konflik sosial dan (e) menguatnya nilai-nilai primordialisme dan fundamentalisme yang dapat mengancam disintegrasi bangsa. Keragaman suku bangsa yang majemuk, akselarasi demokratisasi, dan disparitas ekonomi yang masih tinggi antar daerah merupakan beberapa faktor yang perlu terus dicermati. Pada sisi lain, perubahan politik dunia yang terjadi di era globalisasi, telah menghadirkan suatu kompetisi antar bangsa, yang cenderung mengarah pada perebutan pengaruh antar bangsa. Dinamika tersebut menyebabkan terjadinya perubahan pada situasi ketertiban dunia, munculnya isu-isu teradopsinya nilai-nilai universal, percepatan teknologi informasi dan perubahan kebudayaan nasional, serta kedaulatan pangan maupun energi.

Nilai-nilai universal tersebut antara lain semakin diterima dan menguatnya penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), kebebasan individu, kualitas dan penghargaan terhadap kebudayaan lokal, dan pelestarian lingkungan. Beberapa fenomena global yang mengemuka selain nilai-nilai tersebut antara lain *hedonisme*dan *permisivisme* dalam bentuk kebebasan hubungan seksual, penggunaan zat terlarang dan adiktif, radikalisme dan ekstrimisme, serta nilai-nilai lainnya yang secara

substansi tidak menguntungkan nilai-nilai asli *(genuine)* bangsa Indonesia. Teradopsinya atau diterimanya nilai-nilai universal telah memberikan dinamika baru dalam kehidupan berbangsa.

Dinamika interaksi global juga dipacu dan terfasilitasi oleh kemajuan dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Percepatan dan perkembangan TIK telah mengubah kultur komunikasi antarmanusia dan antarbangsa secara umum. Kemudahan dan bentuk baru komunikasi tersebut memberikan dampak pada perkembangan segi-segi sosial, budaya, politik, ekonomi, maupun ideologi.

Perubahan-perubahantersebut memberikan fakta baru bahwa batas-batas fisik kewilayahan suatu negara semakin kabur sebagai konsekuensi perkembangan TIK. Selain itu, percepatan TIK dan perkembangan ilmu pengetahuan telah menempatkan kedua dimensi tersebut (Iptek dan TIK) menjadi aset dan modal strategis suatu bangsa. Bangsa yang memiliki penguasaan terhadap Iptek dan TIK berimplikasi pada kemampuan untuk mempengaruhi bangsa lain. Penguasaan Iptek dan TIK ditopang oleh kemajuan ekonomi akan memberikan posisi tawar, sekaligus kemampuan hegemoni yang besar dari suatu bangsa terhadap bangsa lainnya. Kemajuan Iptek dan penguasaan TIK memberikan posisi penting saat ini bagi "Dunia Barat" dalam relasinya dengan negara-negara lain.

BAB II
VISI, MISI, DAN TUJUAN KEMENKO PMK

A. Visi Kemenko PMK

Kompleksitas dinamika lingkungan yang akan dihadapi Kemenko PMK dalam menjalankan peran dan Tusinya tergambar jelas dalam kondisi umum, potensi, dan analisis permasalahan yang diuraikan sebelumnya. Pencapaian tujuan Nasional melalui Pembangunan Nasional dapat ditangani secara baik, apabila seluruh jajaran institusi pemerintah terkait dapat dikoordinasikan oleh satu institusi dalam jajaran pemerintahan atau kabinet secara efektif.

Selama ini koordinasi di bidang pembangunan mutu manusia dan lingkungannya dalam jajaran kabinet dilakukan oleh Kemenko Kesra. Namun, saat ini telah berganti nama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). KemenkoPMK mempunyai tugas membantu Presiden dalam mengoordinasikan, menyinkronkan, mengendalikan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang PMK. Setiap K/L yang mempunyai peran, tugas dan fungsi terkait dengan isu PMK akan dikoordinasikan oleh Kemenko PMK. Kondisi tersebut sebagai konsekuensi logis PMK yang memiliki irisan atau *overlapping* dalam pencapaian tujuan serta sasaran yang dilaksanakan oleh K/L.

Kemenko PMK sebagai organisasi Pemerintah dituntut untuk memiliki kemampuan merespon secara cerdas kondisi dinamis lingkungan yang secara alamiah tumbuh, berkembang, dan saling mempengaruhi. Terdapat fakta bahwa dinamika atau perubahan politik dunia di era globalisasi telah menghadirkan kompetisi antarbangsa. Kondisi tersebut cenderung mengarah pada perebutan pengaruh yang cukup ketat, baik pada tingkat regional maupun global.

Perkembangan tersebut antara lain menyebabkan terjadinya perubahan pada situasi ketertiban nasional dan dunia dengan munculnya isu-isu diseminasi (penyebaran) nilai-nilai universal, percepatan teknologi informasi, kedaulatan pangan, dan energi. Globalisasi telah menciptakan arena baru berupa kompetisi antar masyarakat atau warga dunia dalam bentuk kompetisi SDM maupun sumber daya alam. Kondisi tersebut memberikan konsekuensi logis perlunya suatu bangsa meningkatkan kualifikasi dan mutunya secara terus-menerus. Selain itu, kompetisi juga mempermudah perubahan nilai-nilai asli *(genuine)* suatu bangsa sebagai percepatan dan kemudahan pertukaran nilai-nilai antar bangsa. Perubahan nilai dan kebudayaan yang tidak

diantisipasi akan berdampak negatif terhadap upaya dan usaha suatu bangsa dalam mencapai tujuan nasionalnya.

Kondisi lingkungan internal dan eksternal tersebut memberikan gambaran jelas tentang hal-hal yang seharusnya diwujudkan oleh Kemenko PMK. Sebagai koordinator, sinkronisator, dan sekaligus pengendali pelaksanaan kebijakan bidang PMK, maka Kemenko PMK dituntut untuk memiliki kemampuan, kompetensi, dan kesanggupan, baik secara kelembagaan, SDM, maupun fungsi manajemen lainnya dalam mengharmonisasikan kebijakan K/L yang terkait dengan isu di bidang PMK.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Kemenko PMK dalam menjalankan rencana pembangunan jangka menengah nasional 2015-2019 memperhatikan pencapaian kinerja periode Kemenko sebelumnya pada 2010-2014. Pembangunan nasional di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan diarahkan agar mampu mengakomodasi tantangan-tantangan baru, seperti pembinaan generasi muda, pemberdayaan keluarga, dan pemberdayaan perempuan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia dan membangun karakter serta jati diri bangsa melalui pelestarian kebudayaan Indonesia. Dengan mempertimbangkan berbagai hal tersebut, maka Visi Kemenko PMK 2015-2019 adalah sebagai berikut:

"Menjadi Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berdasarkan Gotong Royong"

Kemenko PMK memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Dalam melaksanakan tugasnya Kemenko PMK menjalankan fungsi: a) Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembagunan manusia dan kebudayaan, b) Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, c) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, d) Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, e) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan, f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

'Pembangunan Manusia dan Kebudayaan' merupakan upaya, kebijakan, program, dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia yang sejahtera, maju, berkarakter Pancasila, dan bermartabat. Dengan demikian, urusan PMK adalah segala hal yang terkait dengan upaya memenuhi kebutuhan dasar rakyat, melaksanakan pemberdayaan rakyat agar memiliki kapabilitas kehidupan sosialekonomi yang mandiri dan memperteguh kesadaran berbangsa dan bernegara dalam kebudayaan Indonesia yang berbhinneka tunggal ika dan berlandaskan Pancasila. Pembangunan manusia dan kebudayaan yang tercapaiakan berkontribusi pada terwujudnya "Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berdasarkan Gotong royong". Hal ini sejalan dengan prinsip dasar Trisakti yang menjadi basis sekaligus arah perubahan berdasarkan mandat konstitusi dan menjadi pilihan dalam pengembangan berbangsa dan bernegara yang menolak diskriminasi dan ketergantungan, serta setara dalam membangun kerjasama internasional. Apabila dijabarkan, maka Trisakti dapat diwujudkan kedalam bentuk, 1) Kedaulatan dalam politik, dapat diwujudkan dalam pembangunan demokrasi politik yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan/perwakilan. Dalam hal ini Kedaulatan rakyat menjadi karakter, nilai, dan semangat yang dibangun melalui gotong royong dan persatuan bangsa, 2) Berdikari dalam ekonomi, dapat diwujudkan dalam pembangunan demokrasi ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam pembentukan produksi dan distribusi nasional. Dalam hal ini Negara memiliki karakter kebijakan dan kewibawaan pemimpin yang kuat dan berdaulat dalam mengambil keputusan-keputusan ekonomi rakyat melalui penggunaan sumber daya ekonomi nasional dan anggaran Negara untuk memenuhi hak dasar warga Negara, dan 3) Kepribadian dalam kebudayan yang dapat diwujudkan melalui pembangunan karakter berdasarkan pancasiladan kegotong royongan yang berdasar pada realitas kebhinnekaan dan kemaritiman sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implementasi demokrasi politik dan demokrasi ekonomi Indonesia kedepan. Visi Kemenko PMK tahun 2015-2019 ini tidak terlepas dari upaya mewujudkan visi Pembangunan Nasional 2005-2025 yaitu "Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur" dan melaksanakan misi Pembangunan Nasional 2005-2025, yaitu "Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila"

dan "Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan", sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2005-2025.

Kemenko PMK sebagai koordinator pembangunan manusia dan kebudayaan harus mampu mendorong terwujudnya kualitas, kapabilitas, dan karakter manusia Indonesia yang tinggi dan bermartabat. Perwujudan kualitas, kapabilitas, dan karakter manusia Indonesia menunjukkan adanya upaya maksimal dalam rangka mewujudkan kondisi fisik dan nonfisik manusia dan kebudayaan sebagai nilai-nilai instrumental yang akan berkontribusi secara signifikan dalam pencapaian tujuan nasional jangka menengah.

B. Misi Kemenko PMK

Perumusan misi Kemenko PMK dilakukan dengan memperhatikan peran dan Tusi Kemenko PMK, masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), dan memberikan peluang untuk disesuaikan dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Rumusan misi Kemenko PMK bertujuan untuk mampu: (a) mencakup semua maksud yang terkandung di dalam pernyataan visi, (b) memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai, (c) memberikan petunjuk kelompok sasaran yang akan dilayani oleh instansi pemerintah, dan (d) memperhitungkan berbagai masukan dari *stakeholders*.

Pada hakekatnya Misi Kemenko PMK harus bisa menjawab "Untuk apa kehadiran atau eksistensi Kemenko PMK di tengah eksistensi K/L lainnya?" Dengan demikian, pernyataan misi Kemenko PMK yang dikaitkan dengan visi Kemenko PMK dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Mengoordinasikan dan menyinkronisasikan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan.

2. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan.

Adapun keterkaitan visi dan misi Kemenko PMK tahun 2015-2019 dapat digambarkan sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1.Keterkaitan Pernyataan Visi dan Misi Kemenko PMK 2015-2019

VISI KEMENKO PMK 2015-2019	Menjadi Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berdasarkan GotongRoyong	MISI KEMENKO PMK 2015-2019
		Mengoordinasikan dan menyinkronisasikan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan,serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan
		Meningkatkan kapasitas kelembagaan

Penjelasan Misi Kemenko PMK tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Mengoordinasikan dan menyinkronisasikan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan.

   Misi pertama mengandung arti Kemenko PMK adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi koordinasi dan sikronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan PMK. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan adalah upaya menyusun berbagai keputusan yang bersifat pokok, yang dipandang paling penting dan yang akan dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga menurut prioritasnya guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan Kemenko PMK adalah kekuasaan mengalokasi nilai-nilai untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Hal tersebut mengandung makna terkait kewenangan pemerintah yang meliputi keseluruhan kehidupan masyarakat. Tidak ada suatu organisasi lain yang wewenangnya dapat mencakup seluruh masyarakat, kecuali pemerintah, maka kebijakan adalah sarana untuk mencapai tujuan pembangunan. Pembangunan adalah suatu proses/cara/perbuatan membangun (mendirikan, membina, memperbaiki) yang diorientasikan kepada Manusia sebagai makhluk yangberakal budi (mampu mengatur makhluk lain), dan pengembangan lingkungan serta kebudayaan sebagai hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) manusia, seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Dengan demikian, Keberadaan Kemenko PMK memiliki kewenangan dalam hal menyelaraskan dan mengharmonisasikan kebijakan yang terkait dengan isu di bidang PMK sehingga dapat menjadi suatu respon komprehensif dan terpadu dalam meningkatkan mutu manusia dan kebudayaan Indonesia. Sedangkan 'pengendalian' mempunyai arti bahwa pengendalian dilakukan dengan

tujuan agar yang telah dirumuskan dan ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga dapat mencapai tujuan dan target yang ingin dicapai. Pengendalian merupakan salah satu tugas fungsi Kemenko PMK sebagai penggerak utama pembangunan manusia dan kebudayaan. Pengendalian dilakukan dengan disertai instrumen pengendalian yang memiliki substansi sarana mempertahankan atau menjamin agar pelaksanaan kebijakan berjalan pada tahapan yang benar, dan pencapaian sasaran yang efektif dan efisien. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, serta pengendalian dilakukan untuk mewujudkan kualitas manusia dan kebudayaan yang tinggi dan bermartabat. Kualitas manusia dan kebudayaan menunjukkan adanya upaya maksimal dalam rangka mewujudkan kualitas fisik dan nonfisik manusia dan kebudayaan sebagai nilai-nilai instrumental yang akan berkontribusi signifikan dalam pencapaian tujuan Nasional jangka menengah.

2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan.

Misi kedua mengandung arti Kemenko PMK harus mewujudkan kelayakan menjadi koordinator yang efektif dengan cara meningkatkan kompetensi dan kesanggupan menjalankan peran, tugas, dan fungsi yang telah diamanatkan. Kelayakan tersebut akan tercapai dengan syarat semakin meningkatkan mutu organisasi pada aspek-aspek SDM, kelembagaan, dan manajemen. Ketiga aspek tersebut akan terindikasi dari implementasi tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan. Tata kelola adalah kombinasi proses dan struktur yang diterapkan oleh organisasi untuk menginformasikan, mengarahkan, mengelola, dan memantau kegiatan organisasi dalam rangka pencapaian tujuan. Tata Kelola yang baik adalah baik dalam proses maupun hasilnya. Kemenko PMK dikatakan baik jika produktif dan memperlihatkan hasil dengan indikator kemampuan ekonomi pegawai dan rakyat yang meningkat, baik dalam aspek produktivitas maupun daya belinya, kesejahteraan spritualnya meningkat dengan indikator rasa aman, bahagia, dan memiliki rasa kebangsaan yang tinggi. Sedangkan transparan adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh Kemenko PMK. Transparan dalam tata kelola pemerintahan berarti adanya keterbukaan dalam mengelola organisasi.

C. Tujuan Kemenko PMK

Tujuan Kemenko PMK diartikan sebagai suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun, yang menjadi arah dan dimensi koordinator, dan arah serta dimensi pembangunan manusia dan kebudayaan. Di dalam tujuan terdapat indikator tujuan, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian tujuan untuk diwujudkan pada periode lima tahun. Tujuan tersebut mengacu kepada pernyataan visi yang ingin diwujudkan dan misi yang akan dilaksanakan. Tujuan Kemenko PMK secara substanstif ditetapkan agar mampu memberikan arah pada perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, rumusan Tujuan Kemenko PMK untuk mendukung upaya pencapaian dan perwujudan Visi dan Misi Kemenko PMK dijelaskan melalui Tabel 2.2.

Tabel 2.2.Rumusan Visi, Misi, dan Tujuan Kemenko PMK 2015-2019

KEMENKO PMK 2015-2019		
VISI	MISI	TUJUAN
Menjadi Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berdasarkan Gotong Royong.	1. Mengoordinasikan dan menyinkronisasikan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan.	1. Meningkatnya kualitas koordinasi, sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan.
	2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan.	2. Tercapainya birokrasi yang handal, terpercaya, dan akuntabel.

Tujuan pertama terkait dengan peran, tugas, dan fungsi Kemenko PMK dalam memfasilitasi keharmonisan, keselarasan dalam perumusan, penetapan, dan pelaksanaan pembangunan manusia dan kebudayaan. Meningkatnya mutu koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bermakna upaya-upaya dalam bentuk kebijakan dapat meningkatkan keserasian gerak langkah keseluruhan kementerian yang memiliki irisan kesamaan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Dinamisasi dan harmonisasi tersebut dapat mendorong perwujudan pembangunan manusia dan kebudayaan yang bermutu.

Tujuan pertama juga bermakna pada upaya pembangunan manusia dan kebudayaan Indonesia untuk mewujudkan Warga Negara yang memiliki jiwa kebangsaan dalam kehidupan demokrasi Indonesia, Warga Negara yang berdikari dalam perekonomian yang berkeadilan, dan mewujudkan bangsa yang bergotong royong dan berbhinneka tunggal ika. Upaya pembangunan tersebut akan terwujud dengan semakin berkembang dan meningkatnya kualitas hidup sekaligus keberdayaan manusia Indonesia, serta semakin melembaga dan berkembangnya nilai-nilai kegotongroyongan. Kualitas hidup dan keberdayaan yang dilandasi nilai-nilai kegotongroyongan akan memberikan kekuatan dan kemampuan beradaptasi dalam menghadapi lingkungan yang semakin kompetitif.

Tercapainya birokrasi yang handal, terpercaya, dan akuntabel sebagaimana ditetapkan pada tujuan kedua menjadi prasyarat dan syarat bagi kesanggupan dan kompetensi Kemenko dalam menjalankan peran, tugas, dan fungsinya. Birokrasi yang handal, terpercaya, dan akuntabel mengindikasikan upaya lembaga untuk melakukan perubahan mendasar dari aspek-aspek mentalitas SDM Kemenko PMK untuk menjadi pelayan yang amanah dalam proses pelayanan publik sekaligus menjadi SDM profesional dalam menjalankan tugas profesi sebagai aparatur Negara. Mentalitas SDM aparatur yang semakin profesional dalam pelayanan dan ditunjang dengan organisasi serta manajemen yang efektif akan meningkatkan mutu organisasi yang berdampak pada kemampuan menjalankan peran, tugas, dan fungsi yang telah diamanatkan.

D. Sasaran Strategis KemenkoPMK

Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai oleh Kemenko PMK secara nyata dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Di dalam sasaran terdapat indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Sasaran strategis diupayakan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan Kemenko PMK yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program, dan kegiatan prioritas agar penggunaan sumber daya dapat efisien dan efektif dalam upaya pencapaian visi dan misi organisasi.

Sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kemenko PMK. Sasaran strategis ini mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa program Kemenko PMK. Program Kemenko PMK terdiri dari:

1. Program teknis, yang mencerminkan fungsi sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kepada K/L terkait, dan
2. Program generik merupakan program yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelaksanaan program teknis dan administrasi di lingkungan Kemenko PMK.

Adapun tujuan dan sasaran strategis Kemenko PMK dapat dilihat pada Tabel 2.3. Sasaran strategis ini akan digunakan sebagai dasar penyusunan Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan menjadi dasar penyusunan arah kebijakan dan strategi Kemenko PMK.

Tabel 2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis Kemenko PMK

	SASARAN STRATEGIS	
T1 Meningkatnya kualitas koordinasi, sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan,serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan.	SS1	Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar.
	SS2	Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan untuk mendukung kemantapan pemberdayaan.
	SS3	Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong.
T2 Tercapainya birokrasi yang handal, terpercaya dan akuntabel.	SS4	Meningkatnya efektivitas birokrasi Kemenko PMK.
	SS5	Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan anggaran pada Kemenko PMK.

Sasaran Strategis pertama, kedua, dan ketiga merupakan sasaran Trimantap untuk menjabarkan tujuan pertama. Sasaran tersebut secara

berurutan adalah meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Indonesia, kemantapan pemberdayaan masyarakat Indonesia, serta kemantapan yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam rangka mendukung kegotongroyongan masyarakat Indonesia.

Sasaran Strategis pertama yaitu meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Kemenko PMK dalam menjalankan fungsi koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian (KSP) khususnya dalam meningkatkan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar dalam rangka pencapaian peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia. Ketercapaian atas sasaran ini diindikasikan dari tingkat kepuasan*stakeholder* terhadap kinerja Kemenko PMK dalam menjalankan fungsi KSP dimana kebijakan-kebijakan yang dihasilkan, dapat berdampak terhadap peningkatan program-program penanggulangan kemiskinan khususnya upaya-upaya dalam pemenuhan kebutuhan dasar serta pelayanan-pelayanan dasar masyarakat Indonesia.

Sasaran Strategis kedua yaitu meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan untuk mendukung kemantapan pemberdayaan merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Kemenko PMK dalam menjalankan fungsi koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian (KSP) khususnya dalam meningkatkan Pemberdayaan masyarakat Indonesia dalam rangka pencapaian peningkatan kapabilitas manusia Indonesia. Ketercapaian atas sasaran ini diindikasikan dari tingkat kepuasan *stakeholder* terhadap kinerja Kemenko PMK dalam menjalankan fungsi KSP dimana kebijakan-kebijakan yang dihasilkan, dapat berdampak terhadap peningkatan program-program yang mendukung pemberdayaan masyarakat khususnya kaum perempuan, pemuda, serta kelompok-kelompok marginal di Indonesia.

Sasaran Strategis ketiga yaitu meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan

yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Kemenko PMK dalam menjalankan fungsi koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian (KSP) khususnya dalam meningkatkan karakter/budaya gotong royong masyarakat Indonesia agar dapat melembaga dan dapat diimplementasikan. Ketercapaian atas sasaran ini diindikasikan dari tingkat kepuasan *stakeholders* terhadap kinerja Kemenko PMK dalam menjalankan fungsi KSP dimana kebijakan-kebijakan yang dihasilkan, dapat meningkatkan soliditas sosial, partisipasi budaya, dan upaya-upaya yang dilakukan dalam memperkuat Kebudayaan.

Sasaran Strategis keempat dan kelima adalah meningkatnya efektivitas birokrasi Kemenko PMK dan meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan anggaran pada kemenko PMK. Kedua sasaran strategis tersebut adalah diarahkan untuk mewujudnya secara nyata birokrasi yang handal, terpercaya, dan akuntabel yang memunculkan kesanggupan dan kompetensi Kemenko PMK dalam menjalankan peran, tugas,dan fungsinya. Ketercapaian kedua sasaran strategis tersebut diindikasikan pada meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi, hasil opini terhadap laporan keuangan sebagai hasil pengelolaan keuangan oleh Kemenko PMK, dan meningkatnya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP).

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Penyusunan arah kebijakan dan strategi nasional dalam RPJMN 2015–2019 berpedoman pada RPJPN 2005-2025 sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 17 Tahun 2007. Untuk pelaksanaannya, RPJPN 2005-2025 dibagi dalam empat tahap, yakni RPJMN I (2005–2009), RPJMN II (2010–2014), RPJMN III (2015–2019), dan RPJMN IV (2020–2024). Masing-masing tahap memiliki tujuan pembangunan nasional sebagaimana terlihat pada Gambar 3.

Sumber: RPJPN 2005-2025

Gambar 3.Tahapan RPJPN 2005-2025

Dalam kerangka pencapaian visi jangka panjang, yakni Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur, RPJPN 2005–2025 mengamanatkan bahwa RPJMN III periode 2015–2019 diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas, serta kemampuan Iptek. Sebagaimana disebutkan dalam Buku I RPJMN 2015–2019 pada subbab 2.2, bahwa terdapat tantangan utama pembangunan yang dapat dikelompokkan atas: (1) dalam rangka meningkatkan wibawa negara, tantangan utama pembangunan mencakup peningkatan stabilitas dan keamanan negara,

pembangunan tata kelola untuk menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien, serta pemberantasan korupsi; (2) dalam rangka memperkuat sendi perekonomian bangsa, tantangan utama pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, percepatan pemerataan dan keadilan, serta keberlanjutan pembangunan; (3) dalam rangka memperbaiki krisis kepribadian bangsa termasuk intoleransi, tantangan utama pembangunan mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengurangan kesenjangan antar wilayah, dan percepatan pembangunan kelautan.

Berdasarkan dinamika tantangan tersebut, dalam Strategi Pembangunan Nasional ditekankan pada beberapa hal sebagai berikut: pada konteks norma, maka perlu diterapkan bahwa (i) Membangun dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat, (ii) Upaya meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, dan produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar, dan (iii) Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak ekosistem. Selain itu pada konteks pembangunan terdapat juga dimensi pembangunan, yaitu (i) Pembangunan manusia dan masyarakat, (ii) Dimensi pembangunan sektor unggulan dengan prioritas, dan (iii) Dimensi pemerataan dan kewilayahan. Mencermati kondisi tersebut, nampak bahwa aspek-aspek sumber daya manusia dan masyarakat sangat diperhatikan dalam strategi pembangunan Nasional.

Selanjutnya untuk menunjukkan prioritas pembangunan, pada jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda pembangunan nasional (Nawacita). Agenda tersebut adalah: (i) Citake-1, Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara, (ii) Cita ke-2, Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, (iii) Cita ke-3, Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, (iv) Cita ke-4, Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya, (v) Cita ke-5, Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia, (vi) Cita ke-6, Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional, (vii) Cita ke-7, Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, (viii) Cita ke-8, Melakukan revolusi karakter

bangsa, dan (ix) Cita ke-9, Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Untuk mencapai visi dan terlaksananya agenda pembangunan nasional 2015-2019, maka sasaran utama Pembangunan adalah: (i) Sasaran Makro, (ii) Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat, (iii) Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan, (iv) Sasaran Dimensi Pemerataan, (v) Sasaran Pembangunan Wilayah dan Antar wilayah, dan (vi) Sasaran Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan. Pada sasaran makro pembangunan manusia dan masyarakat dan ekonomi dapat ditunjukkan seperti terlihat pada Tabel 3.1. Sementara Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat dijelaskan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.1. Sasaran Makro RPJMN 2015-2019

INDIKATOR	2014 (*BASELINE*)	2015	2019
Pembangunan Manusia dan Masyarakat			
• Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,83 (metode lama)	69,4 (metode baru)	76,3 (metode lama)
• Indeks Pembangunan Masyarakat	0,55	-	Meningkat
• Indeks Gini	0,41	0,40	0,36
• Pertumbuhan ekonomi	5,1%	5,7%	8,0%
• PDB per Kapita (Rp ribu) tahun dasar 2010	43.403	-	72.217
• PDB per Kapita (Rp ribu) tahun dasar 2000	40.785	-	-
• Tingkat Kemiskinan	10,96%	10,3	7,0-8,0%
• Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,94%	5,6%	4,0-5,0%

Berdasarkan kondisi dan sasaranyang hendak dicapai tersebut, maka arah kebijakan umum pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019 adalah (1) meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, (2) meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam (SDA) yang berkelanjutan, (3) mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan, (4) meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana alam, dan perubahan iklim, (5) menyiapkan landasan pembangunan yang kokoh, (6) meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, (7) mengembangkan dan

memeratakan pembangunan daerah, (8) menegakkan kedaulatan dan yuridiksi nasional, serta percepatan pengembangan ekonomi kelautan.

Tabel 3.2.Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat RPJMN 2015-2019

NO.	INDIKATOR	2014 (*BASELINE*)	2019
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT			
Kependudukan dan Keluarga Berencana			
•	Rata-rata Laju PertumbuhanPenduduk	1,49%/tahun (2000-2010)	1,19%/tahun (2010-2020)
•	Angka kelahiran total (Total FertilityRate/TFR)	2,6 (2012)	2,3
Pendidikan			
•	Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15tahun	8,1 tahun	8,8 tahun
•	Rata-rata angka melek aksara penduduk usia diatas 15tahun	94,1%	96,1%
•	Prodi perguruan tinggi minimal berakreditasiB	50,4%	68,4%
•	Persentase SD/MI berakreditasi minimalB	68,7%	84,2%
•	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimalB	62,5%	81,0%
•	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B	73,5%	84,6%
•	Persentase Kompetensi Keahlian SMK berakreditasi minimalB	48,2%	65,0%
Kesehatan			
1.	Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat		
	a. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran	359(SDKI 2012)	306
	b. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	32(2012/2013)	24
	c. Prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita (%)	19,6(2013)	17
	d. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) anak baduta (%)	32,9(2013)	28
2.	Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular		
	a. Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk	297(2013)	245
	b. Prevalensi HIV pada populasi dewasa (%)	0,43(2013)	<0,5
	c. Prevalensi tekanan darah tinggi (%)	25,8(2013)	23,4
	d. Prevalensi kegemukan dan obesitas padapendudukusia18+ tahun(%)	28,9(2013)	28,9
	e. Persentase merokok penduduk usia 15-19tahun	18,3(2013)	15,3
3.	Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan		
	a. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas terakreditasi	0	5.600
	b. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi	-	95
4.	Meningkatnya Perlindungan Finansial, Pemerataan dan Mutu Pelayanan, serta Ketersediaan, Penyebaran dan Mutu Obat dan Sumber Daya Kesehatan		
	a. Kepesertaan SJSN kesehatan (persen)	51,8 (Oktober 2014)	Min 95
	b. Jumlah puskesmas yang minimal memiliki5jenistenaga kesehatan	1.920	3.840
Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan			
•	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	69,6(2013)	Meningkat
•	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70,5(2013)	Meningkat
Perlindungan Anak			
•	Prevalensi Kekerasan terhadap Anak	Laki-laki: 38,62%; Perempuan: 20,48% (2013)	Menurun
Pembangunan Masyarakat			
•	Indeks gotong royong (mengukur kepercayaan kepada lingkungan tempattinggal,kemudahan mendapatkan pertolongan ,aksikolektif masyarakat dalam membantu masyarakat yang membutuhkan dan kegiatan bakti sosial,serta jejaring sosial)	0,55(2012)	Meningkat

• Indeks toleransi (mengukur nilai toleransi masyarakat dalam menerima kegiatan agama dan suku lain di lingkungan tempat tinggal)	0,49(2012)	Meningkat
• Jumlah konflik sosial (pertahun)	164(2013)	Menurun

Selanjutnya agenda pembangunan nasional sebagaimana termaktub dalam Buku 1 RPJMN 2015-2019 dirinci menjadi beberapa sub agenda pembangunan. Berdasarkan agenda dan sub agenda pembangunan tersebut terdapat 13 sub agenda pembangunan yang menjadi mandat untuk dilaksanakan Kemenko PMK.

1. Sasaran Sub Agenda Pembangunan yang Terkait dengan PMK

   Sasaran pembangunan pada agenda dan sub agenda yang menjadi mandat Kemenko PMK dijabarkan sebagai berikut:

   a. Nawacita ke-1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.

      a. Sub Agenda: Meningkatkan kualitas perlindungan warga negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri. Sasaran pembangunan ini adalah meningkatnya kualitas perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI) di luar negeri.

      b. Sub Agenda: Melindungi hak dan keselamatan pekerja migran. Sasaran pembangunan ini adalah menurunnya jumlah pekerja migran yang menghadapi masalah hukum di dalam dan luar negeri.

      c. Sub Agenda: Memperkuat peran Indonesia dalam kerjasama global dan regional. Sasaran pembangunan ini adalah Meningkatnya peran dan kepemimpinan Indonesia di tingkat regional ASEAN.

   b. Nawacita ke-2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

      Sub Agenda: Meningkatkan Peranan dan Keterwakilan Perempuan dalam Politik dan Pembangunan. Sasaran pembangunan subagenda ini adalah meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan diberbagai bidang pembangunan dan meningkatnya keterwakilan perempuan dalam politik termasuk dalam proses pengambil keputusan di lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.

   c. Nawacita ke-3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

1) Sub Agenda: Peletakan dasar-dasar dimulainya Desentralisasi Asimetris dengan sasaran mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam NKRI di beberapa daerah dengan kategori (a) Pengembangan Kawasan Perbatasan dan pulau-pulau terluar, (b) Daerah Tertinggal dan terpencil, (c) Desa tertinggal, dan (d) Daerah-daerah yang kapasitas pemerintahannya belum cukup memadai dalam memberikan pelayanan publik.
2) Sub Agenda: Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan antar kelompok ekonomi masyarakat dengan sasaran menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 7,0–8,0 persen pada tahun 2019 dengan sasaran untuk mewujudkan pembangunan yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dengan cara:
   a) Meningkatnya potensi para pekerja, sehingga memperluas kesempatan pekerjaan yang layak bagi masyarakat yang kurang mampu (*decent job*);
   b) Meningkatnya akses usaha mikro dan kecil untuk mengembangkan keterampilan, pendampingan, modal usaha, dan pengembangan teknologi;
   c) Terbentuknya kemitraan pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta/BUMN/BUMD dalam pengembangan kapasitas dan keterampilan masyarakat dalam rangka peningkatan penghidupan masyarakat;
   d) Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi yang berkualitas;
   e) Meningkatnya penjangkauan pelayanan dasar mencakup identitas hukum, sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan sarana ekonomi yang inklusif bagi masyarakat kurang mampu termasuk penyandang disabilitas dan lansia;
   f) Meningkatnya perlindungan sosial, produktivitas dan pemenuhan hak dasar bagi penduduk kurang mampu;
   g) Mengembangkan penghidupan berkelanjutan bagi masyarakat miskin melalui penyaluran tenaga kerja dan pengembangan kewirausahaan;

h) Kebijakan tenaga kerja yang kondusif dan perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat kurang mampu dengan meningkatkan iklim investasi yang bersifat padat pekerja; dan

i) Menguatkan konektivitas lokasi pedesaan dengan pembangunan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi di perdesaan yang dapat menghubungkan lokasi-lokasi produksi usaha mikro dan kecil kepada pusat ekonomi terdekat.

d. Nawacita ke-4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

Sub Agenda: Melindungi Anak, Perempuan, dan Kelompok Marjinal dengan sasaran tersedianya sistem perlindungan dari berbagai tindak kekerasan dan perlakuan salah lainnya dengan mengoptimalkan upaya pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi terhadap anak, perempuan, dan kelompok marjinal.

e. Nawacita ke-5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.

1) Subagenda: Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana (PKKB), dengan sasaranpembangunan kependudukan dan keluarga berencana.

Tabel 3.3.Sasaran PKKB

INDIKATOR	SATUAN	STATUS AWAL	TARGET 2019
Angka kelahiran (*Total Fertility Rate*/TFR)	% Perempuan usiareproduktif 15-49 tahun	2,60	2,3
Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need* dengan perhitungan baru)	%	11,4	9,9
Angka prevalensi kontrasepsi (*contraceptive prevalence rate*/CPR) semua cara (*all methods*)	% perempuan usia 15-49 tahun	61,9	66,0
Penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	%	18,3	23,5
Tingkat putus pakai kontrasepsi	%	27,1	24,6

2) Subagenda: Pembangunan Pendidikan khususnya Pelaksanaan Program Indonesia Pintar, dengan sasaran sebagai berikut:

Meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah

Tabel 3.4.Sasaran Pembangunan Pendidikan

JENJANG/KOMPONEN	SATUAN	STATUS AWAL	TARGET 2019
I. Pendidikan Dasar			
a. SD/MI/SDLB/Paket A			
Angka Partisipasi Murni SD/MI	%	91,30	94,8
Angka Partisipasi Kasar SD/MI/ SDLB/Paket A	%	111,0	114,1
b. SMP/MTs/SMPLB/Paket B			
Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	%	79,40	82,0
Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B	%	101,6	106,9
II. Pendidikan Menengah			
Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK	%	55,30	67,5
Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/SMK/Paket C	%	79,20	91,6
III. Pendidikan Anak Usia Dini			
Angka Partisipasi PAUD	%	66,80	77,2
IV. Pendidikan Tinggi			
Angka Partisipasi Kasar PT	%	28,50	36,7

3) Sub Agenda: Pelaksanaan Program Indonesia Sehat, dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Sasaran pokok RPJMN 2015-2019 adalah: (1) meningkatnya status kesehatandan gizi ibu dan anak; (2)meningkatnya pengendalian penyakit; (3) meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal, dan perbatasan; (4) meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan, (5) terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat, dan vaksin; serta (6) meningkatkan responsivitas sistem kesehatan. Sasaran pokok tersebut antara lain tercermin dari indikator sebagaimana terlihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5.Sasaran Pembangunan Kesehatan

NO.	INDIKATOR	STATUS AWAL	2019
PEMBANGUNAN KESEHATAN			
1. Meningkatnya Status Kesehatan dan GiziMasyarakat			
	1. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran.	346 (SP 2010)	306
	2. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup.	32 (2012/2013)	24
	3. Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (%).	19,6 (2013)	17
	4. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) anak balita (%).	32,9 (2013)	28
2. Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan TidakMenular			
	1. Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk.	297 (2013)	245
	2. Prevalensi HIV pada populasi dewasa (%).	0,46 (2014)	<0,5
	3. Jumlah kabupaten/kota mencapai eliminasi malaria.	212 (2013)	300
	4. Prevalensi tekanan darah tinggi (%).	25,8 (2013)	23,4
	5. Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+ tahun (persen).	15,4 (2013)	15,4
	6. Prevalensi merokok penduduk usia ≤ 18 tahun.	7,2 (2013)	5,4
3. Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan			
	1. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi dan terakreditasi.	0 (2014)	5.600
	2. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi dan terakreditasi nasional.	10 (2014)	481
	3. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi.	71,2 (2013)	95
4. Meningkatnya Perlindungan Finansial, Pemerataan dan Mutu Pelayanan, serta Ketersediaan, Penyebaran dan Mutu Obat, serta Sumber Daya Kesehatan			
	1. Kepesertaan SJSN kesehatan (persen).	51,8(2014)	Min 95
	2. Jumlah puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan.	1.015 (2013)	5.600
	3. Persentase RSU kab/kota kelas C yang memiliki 7 dokter spesialis.	25 (2013)	60
	4. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas.	75,5 (2014)	90,0
	5. Persentase obat yang memenuhi syarat.	92 (2014)	94

f. Nawacita ke-6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

Sub Agenda: Peningkatan Kapasitas Inovasi dan Teknologi dengan Sasaran pembangunan Iptek adalah meningkatnya kapasitas Iptek yang dijabarkan sebagai berikut:

1) Meningkatnya hasil penyelenggaraan penelitian, pengembangan, dan penerapan Iptek yang mendukung:
   a) daya saing sektor produksi barang dan jasa;
   b) keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam; serta
   c) penyiapanmasyarakat Indonesia menyongsong kehidupan global.
2) Meningkatnya dukungan bagi kegiatan Iptek termasuk penyediaan SDM, sarana prasarana, kelembagaan, dan jaringan.
3) Terbangunnya 100 *Techno Park* di kabupaten/kota, dan *Science Park* di setiap provinsi.

g. Nawacita ke-7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor ekonomi strategis dan ekonomi domestik.

Subagenda: Penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencanadengan sasaran menurunnya indeks risikobencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang memiliki risiko tinggi pelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup, dan pengelolaan bencana.

h. Nawacita ke-8. Melakukan revolusi karakter bangsa, memiliki sasaran pembangunan yang ingin dicapai dalam melakukan revolusi karakter bangsa adalah:

1) Meningkatnya kualitas pendidikan karakter untuk membina budi pekerti, membangun watak, dan menyeimbangkan kepribadian peserta didik;
2) Meningkatnya wawasan kebangsaan dikalangan anak usia sekolah yang berdampak pada menguatnya nilai-nilai nasionalisme dan rasa cinta tanah air sebagai cerminan warga negara yang baik;
3) Meningkatnya pemahaman mengenai pluralitas sosial dan keberagaman budaya dalam masyarakat, yang berdampak pada kesediaan membangun harmoni sosial, menumbuhkan sikap toleransi, dan menjaga kesatuan dalam keanekaragaman;
4) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah yang tercermin pada peningkatan pemahaman,

penghayatan, dan pengamalan ajaran-ajaran agama dikalangan pelajar di sekolah;

5) Meningkatnya budaya dan aktivitas riset serta pengembangan ilmu dasar dan ilmu terapan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, serta mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;
6) Meningkatnya lulusan-lulusan perguruan tinggi yang berkualitas, menguasai teknologi, dan berketerampilan sehingga lebih cepat terserap oleh pasar kerja;
7) Meningkatnya budaya produksi sehingga lebih kuat dari budaya konsumsi;
8) Meningkatnya budaya inovasi di masyarakat.

i. Nawacita ke-9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Sasaran yang akan dicapai dalam rangka meneguhkan kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial pada tahun 2015–2019 adalah sebagai berikut:

1) Terbangunnya modal sosial guna mewujudkan kepedulian sosial, gotong royong, kepercayaan antar warga, perlindungan lembaga adat, serta kehidupan bermasyarakat tanpa diskriminasi dan penguatan nilai kesetiakawanan sosial;
2) Terbangunnya kesadaran kolektif untuk menjunjung tertib sosial;
3) Meningkatnya peran pranata sosial-budaya untuk memperkuat kohesi, harmoni, dan solidaritas sosial berbasis nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab;
4) Meningkatnya ketaatan semua unsur didalam masyarakat terhadap hukum sesuai amanat konstitusi;
5) Menguatnya lembaga kebudayaan sebagai basis budaya pembangunan karakter bangsa;
6) Meningkatnya promosi dan diplomasi kebudayaan sebagai upaya pertukaran budaya untuk meningkatkan pemahaman kemajemukan dan penghargaan terhadap perbedaan antar suku-bangsa secara nasional maupun internasional;
7) Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama, antara lain melalui: (i) peningkatan jumlah dan kualitas penyuluh agama yang tersebar merata di seluruh wilayah; (ii) peningkatan fasilitasi pembinaan dan pemberdayaan umat beragama; (iii)

peningkatan intensitas dialog antara guru agama dan pendakwah dengan cendekiawan;

8) Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan umat beragama, antara lain ditandai dengan: (i) meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan dialog antar umat beragama dikalangan tokoh agama, pemuda, dan lembaga sosial keagamaan; (ii) meningkatnya pembinaan dan pengembangan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);
9) Meningkatnya pembangunan karakter, tumbuhnya jiwa patriotisme, budaya prestasi, dan profesionalitas pemuda, yang ditandai dengan: (i) meningkatnya partisipasi kader pemuda dalam pendidikan kepramukaan; dan (ii) meningkatnya partisipasi kader pemuda dalam pengembangan wawasan kebangsaan, bela negara, dan ketahanan nasional;
10) Meningkatnya partisipasi pemuda;
11) Di berbagai bidang pembangunan, terutama di bidang sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama yang ditandai dengan: (i) meningkatnya partisipasi kader pemuda kepeloporan, kepemimpinan, dan kewirausahaan; dan (ii) meningkatnya partisipasi kader pemuda dalam kegiatan organisasi kepemudaan;
12) Meningkatnya budaya dan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional yang ditandai dengan: (i) meningkatnya prosentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga; (ii) posisi papan atas pada kejuaraan *South East Asia (SEA) Games* dan *ASEAN Para Games* 2015, 2017, dan 2019; dan (iii) meningkatnya perolehan medali pada kejuaraan *SEA Games* dan *ASEAN Para Games* 2018, serta *Olympic Games* dan *Paralympic Games* 2016.

Selanjutnya Tabel 3.6 memperlihatkan keterkaitan antara Nawacita dengan Agenda Pembangunan Kemenko PMK.

Tabel 3.6. Keterkaitan Nawacita dan Agenda Pembangunan Kemenko PMK

NO.	NAWACITA	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	AGENDA PEMBANGUNAN KEMENKO PMK
1.	Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warganya.	• Meningkatkan kualitas perlindungan warga negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri • Melindungi hak dan keselamatan pekerja migran • Memperkuat peran Indonesia dalam kerjasama global dan regional	• Perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri • Membekali Pekerja Migran dengan Pengetahuan, Pendidikan dan Keahlian Penguatan diplomasi inklusif Indonesia di ASEAN untuk mewujudkan kawasan yang aman, stabil, dan sejahtera sesuai kepentingan nasional	• Meningkatkan perlindungan dan pemajuan hak-hak pekerja migran di luar negeri • Pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) • Peningkatan peran serta Indonesia di ASEAN • Pemberdayaan pekerja migran dan Keluargannya
2.	Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.	Meningkatkan Kualitas Hidup dan Peran Perempuan	Meningkatkan kualitas hidup, peran politik, dan pengarusutamaan gender	Meningkatkan Peranan dan Keterwakilan Perempuan dalam Politik dan Pembangunan
3.	Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan memperkuat daerah- daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan.	• Meningkatkan Pembangunan Kawasan Perbatasan • Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (IPM, SPM,Kemiskinan)	Meningkatkan Pembangunan Kawasan Perbatasan, Kesejahteraan Masyarakat, SDM, serta penguatan keberdayaan masyarakat.	• Peletakan dasar-dasardimulainya Desentralisasi Asimetris • Penanggulangan kemiskinan dan Pengurangan ketimpangan antar kelompok ekonomi masyarakat
4.	Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya	Tersedianya Sistem Perlindungan	Memperkuat sistem perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO), dengan melakukan berbagai upaya pencegahan dan penindakan	Melindungi Anak, Perempuan, dan Kelompok Marjinal
5.	Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia	Kualitas Hidup: Ibu- Anak, Pendidikan, Kesehatan, Pemenuhan Gizi	Penguatan kebijakan keluarga berencana dan sejahtera, Penguatan kebijakan pemenuhan hak pendidikan, akses, mutu dan peran masyarakat dalam pendidikan, Pemenuhan pelayanan kesehatan kelompok masyarakat, mutu pelayanan, gizi, dan pemerataan kualitas pelayanan dasar	• Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana • Pembangunan Pendidikan khususnya Pelaksanaan Program Indonesia Pintar • Pembangunan Kesehatan khususnya Pelaksanaan Program Indonesia Sehat
6.	Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional	Daya Saing	Peningkatan penelitian pengembangan, pelayanan perekayasaan teknologi, penguatan Sumber daya Informasi dan pengetahuan, peningkatan mutu SDM Iptek dan penciptaan taman-taman sains dan teknologi nasional	Peningkatan Kapasitas Inovasi dan Teknologi
7.	Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik	Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana	Mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana	Pengelolaan bencana
8.	Melakukan revolusi karakter bangsa	Kualitas Pendidikan, Wawasan Kebangsaan	Pengembangan pendidikan kewarganegaraan, pendidikan agama, penguatan budaya produksi dan inovasi	Revolusi karakter bangsa

NO.	NAWACITA	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	AGENDA PEMBANGUNAN KEMENKO PMK
9.	Memperteguh keBhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia	Terbangunnya Modal Sosial, Penguatan Lembaga Budaya, Kerukunan Beragama	Penguatan dan pengembangan: pendidikan kebhinnekaan dan pekerti, modal dan kelembagaan sosial, kepatuhan hukum, budaya lokal, kerukunan antar agama, peran kepemudaan serta kesetiakawanan sosial.	· Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia · Peningkatan kualitas pemahaman dan Pengamalan ajaran agama

Bidang PMK melibatkan banyak K/L sehingga membutuhkan peran penyelarasan dan harmonisasi kebijakan yang dapat diperankan oleh Kemenko PMK berdasarkan Tusi yang telah diamanatkan. Peran dan Tusi Kemenko PMK diharapkan dapat meminimalkan dan mereduksi masalah dan tantangan utama pembangunan khususnya yang terkait PMK, berkontribusi pada pencapaian sasaran nasional, dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan PMK. Kemenko PMK adalah salah satu bagian yang terlibat dalam suatu sistem Pembangunan tersebut, dan akan memberikan kontribusi positif dan signifikan apabila Peran dan Tusi Kemenko PMK dapat dijalankan secara efektif.

B. Arah Kebijakan dan Strategi Kemenko PMK

SDM adalah modal utama dalam pembangunan nasional. Terkait dengan hal tersebut, makaupaya-upaya untuk meningkatkan kualitas SDM terus ditingkatkan, sehingga mampu memberikan daya saing yang tinggi, antara lain ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), yang dicapai melalui pengendalian penduduk, peningkatan taraf pendidikan, dan peningkatan derajat kesehatan dan gizi masyarakat. Secara faktual analisis kondisi pembangunan limatahun ke depan sebagaimana termaktub dalam RPJMN 2015-2019 secara khusus terdapat tantangan utama dalam pembangunan SDM. Tantangan pembangunan SDM dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tantangan dalam pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat, meliputi peningkatan upaya promotif dan preventif, meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi (spesifik dansensitif), mengendalikan penyakit menular maupun tidak menular, meningkatkan pengawasan obat dan makanan, serta meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Disamping itu pembangunan kesehatan juga dihadapkan pada upaya untuk menurunkan disparitas akses dan mutu pelayanan kesehatan, pemenuhan sarana prasarana dan tenaga kesehatan. Secara khusus tantangan utama dalam lima tahun ke depan adalah dalam

meningkatkan kepersertaan Jaminan Kesehatan Nasional, penyiapan *provider* dan pengelolaan jaminaan kesehatan untuk mendukung pencapaian sasaran nasional;

2. Tantangan dalam pembangunan pendidikan meliputi, upaya percepatan peningkatan taraf pendidikan seluruh masyarakat untuk memenuhi hak seluruh penduduk usia sekolah dalam memperoleh layanan pendidikan dasar yang berkualitas, dan meningkatkan akses pendidikan pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi; menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok sosial-ekonomi, antar wilayah dan antar jenis kelamin, dengan memberikan pemihakan bagi seluruh anak dari keluarga kurang mampu, serta meningkatkan pembelajaran sepanjang hayat. Dalamrangka melakukan revolusi karakter bangsa, tantangan yang dihadapi adalah menjadikan proses pendidikan sebagai sarana pembentukan watak dan kepribadian siswa yang matang dengan internalisasi dan pengintegrasian pendidikan karakter dalam kurikulum, sistem pembelajaran dan sistem penilaian dalam pendidikan;
3. Tantangan utama yang dihadapi dalam rangka memperkukuh karakter dan jatidiri bangsa adalah meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengadopsi budaya global yang positif dan produktif, serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya bahasa, adat, tradisi, dan nilai-nilai kearifan lokal yang bersifat positif sebagai perekat persatuan bangsa; meningkatkan promosi budaya antar daerah dan diplomasi budaya antarnegara; dan meningkatkan kualitas pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya;
4. Tantangan dalam mempercepat peningkatan kesetaraan gender dan peranan perempuan dalam pembangunan adalah meningkatkan pemahaman, komitmen, dan kemampuan para pengambil kebijakan dan pelaku pembangunan akan pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan, penguatan kelembagaan pengarus-utamaan gender termasuk perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di pusat dan di daerah; dan
5. Tantangan dalam peningkatan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan perlakuan salah lainnya adalah merubah sikap permisif masyarakat dan praktek budaya yang toleran terhadap kekerasan dan perlakuan salah lainnya, serta melaksanakan sistem perlindungan perempuan dan anak secara terkoordinasi dan menyeluruh, mulai dari upaya pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi.

Mandat penyelenggaraan Koordinasi kelembagaan yang diamanatkan kepada Kemenko PMK demikian luas dan melibatkan banyak K/L dalam pemerintahan baru. Hal ini dimaklumi mengingat luasnya dinamika pembangunan PMK, tingginya irisan dan keterkaitan antar unsur-unsur atau komponen-komponen pembentuk kualitas PMK, keterpaduan yang tak terpisahkan antara kualitas fisik dan nonfisik dalam PMK, dan keterkaitan yang tak terpisahkan antara dimensi masyarakat dengan individu, antara kolektivitas waktu lampau, kini, dan masa depan, serta antar kewilayahan. Dengan demikian, Kemenko PMK perlu membuat fokus penyelenggaraan koordinasi yang memiliki karakteristik dapat berkontribusi dan berdampak luas pada pencapaian pembangunan nasional secara keseluruhan.

Mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan eksternal, masalah dan potensi, isu strategis sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan Kondisi umum, tantangan pembangunan nasional, agenda prioritas (Nawacita) dan subagenda serta sasaran pembangunan yang terkait dengan pembangunan manusia dan kebudayaan, serta mandat koordinasi PMK yang diamanatkan kepada Kemenko PMK dalam RPJMN 2015-2019, maka Kemenko PMK mengelompokkan secara garis besar lima fokus koordinasi program dan kegiatan yang dilakukan kementerian dan lembaga serta masyarakat dalam pembangunan manusia dan kebudayaan. Seperti ditunjukkan Gambar 4, lima fokus koordinasi tersebut adalah:

1. Selaras Basis Data
2. Jaminan Kebutuhan dan Pelayanan Dasar
3. Pembangunan Manusia Berkarakter
4. Pemberdayaan Masyarakat
5. Pembangunan Desa Semesta

Gambar 4. Lima Fokus Koordinasi Kemenko PMK

Pemberian nomor pada masing-masing fokus, bukanlah sebuah indikasi urutan penyelenggaraan fokus dalam koordinasi PMK. Kelima focus dimaksud untuk membuat kategori pemusatan perhatian pada keseluruhan PMK yang melibatkan banyak K/L. Berikut titik-titik pusat koordinasi dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan:

1. Fokus pertama, yaitu fokus koordinasi pada Selaras Basis Data adalah upaya Kemenko PMK memusatkan titik koordinasi pada penggalangan seluruh data dan informasi yang terkait dan berperan dalam kerangka PMK, yang tersedia dan tersebar atau dimiliki oleh K/L terkait. Penggalangan keseluruhan data dan informasi tersebut dimaksudkan untuk menyusun keselarasan, kesamaan suatu basis data yang menyatu, terintegrasi, dan memudahkan proses pengambilan keputusan dalam PMK. Penggalangan keseluruhan data dan informasi juga dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi yang bersifat terverifikasi, *valid* (terpercaya), *reliable* (andal), dan disepakati sebagai data dan informasi bersama dalam PMK. Keberhasilan Fokus koordinasi yang pertama, akan memberikan kemudahan bagi K/L yang terkait dalam mengambil keputusan dan kebijakan dalam PMK, sekaligus memudahkan koordinasi, verifikasi, efektivitas, dan efisiensi bagi Kemenko PMK dalam mewujudkan pencapaian tujuan PMK.
2. Fokus kedua, yaitu Jaminan Kebutuhan dan Pelayanan Dasar adalah upaya Kemenko PMK memusatkan titik koordinasi pada terpenuhinya dan terfasilitasinya bidang-bidang pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar manusia dan masyarakat Indonesia. Pemenuhan dan pelayanan kebutuhan dasar adalah keseluruhan kerangka pembangunan yang terkait dengan keberhasilan Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana, Pembangunan Pendidikan khususnya pelaksanaan Program Indonesia Pintar, dan Pembangunan Kesehatan khususnya pelaksanaan Program Indonesia Sehat, dan pembangunan dalam mewujudkan keamanan, khususnya Perlindungan Anak, Perempuan, dan Kelompok Marjinal. Keberhasilan fokus koordinasi akan mempermudah tercapainya manusia Indonesia yang berkualitas serta semakin meningkatnya ketenteraman masyarakat sebagai wujud dirasakannya kehadiran negara dalam memfasilitasi kebutuhan dan memecahkan masalah warganya. Fokus jaminan kebutuhan dan pelayanan dasar meliputi: a) Pendidikan, b) Kesehatan, c) Pekerjaan Umum, d)Penataan Ruang, e) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, f) Ketentraman, g) Ketertiban Umum, h)

Perlindungan Masyarakat, i) Sosial, j) Indentitas, dan k) Infrasrtuktur Dasar (Air Bersih dan Sanitasi).

3. Fokus ketiga, yaitu fokus koordinasi dalam Pembangunan Manusia Berkarakteradalah upaya Kemenko PMK dalam memusatkan titik koordinasi pada kerangka pembangunan dan pengembangan pendidikan kewarganegaraan, pendidikan agama, penguatan budaya produksi dan inovasi serta penguatan dan pengembangan pendidikan kebhinnekaan dan budi pekerti, kelembagaan sosial, kepatuhan hukum, budaya lokal, kerukunan antar umat beragama, serta kesetiakawanan sosial. Fokus ketiga dimaksudkan sebagai upaya mengharmonisasikan prinsip-prinsip internalisasi nilai-nilai pendidikan yang luhur dari berbagai sumber, baik agama, budaya lokal, maupun nilai-nilai kebijakan yang mengakar di masyarakat Indonesia. Fokus ketiga juga dimaksudkan untuk memfasilitasi kelestarian budaya lokal yang*genuine* (asli), kelembagaan sosial sehingga dapat berperan dan berkontribusi bagi penguatan keseluruhan karakter manusia dan bangsa Indonesia. Keberhasilan fokus koordinasi iniakan memudahkan pencapaian pembangunan dalam rangka merevolusi karakter bangsa serta memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
4. Fokus keempat, yaitu fokus koordinasi dalam Pemberdayaan Masyarakat, adalah upaya Kemenko PMK memusatkan titik koordinasi pada daya serta upaya memunculkan, memfasilitasi potensi, dan keberdayaan masyarakat Indonesia. Pengembangan potensi dan keberdayaan masyarakat Indonesia adalah semua kerangka pembangunan dalam peningkatan peranan perempuan, pemuda, keluarga dalam konteks kontribusinya pada pemecahan-pemecahan masalah diri sendiri, kelompok, dan/atau komunitas maupun partisipasinya dalam pembangunan dalam makna yang luas. Potensi dan keberdayaan juga dimaknai dalam upaya meningkatkan kapasitas inovasi dan penguasaan teknologi untuk meningkatkan daya saing. Keberhasilan fokus koordinasi ini akan memudahkan pencapaian berupa tumbuhnya kepercayaan masyarakat pada Pemerintah dan meningkatnya produktivitas rakyat, daya saing, dan kemajuan bangsa.
5. Fokus yang terakhir atau fokus kelima, yaitu fokus koordinasi dalam Pembangunan Desa secara keseluruhan atau Desa Semesta. Koordinasi dalam Pembangunan desa adalah upaya Kemenko PMK memusatkan titik koordinasi untuk memfasilitasi percepatan pembangunan perdesaan yang bermartabat, memperkuat pembangunan daerah berlandaskan

desentralisasi asimetris, serta upaya-upaya mengurangi jarak atau ketimpangan antar Kelompok Ekonomi Masyarakat. Fokus koordinasi pembangunan desa berupaya untuk memfasilitasi K/L yang terlibat dalampembangunan fisik dan nonfisik perdesaanakan bersatupadu, terintegrasi, dan terkoordinasi dalam mewujudkan daerah dan desa yang sejahtera dimana masyarakatnya hidup harmoni, adil, dan makmur. Keberhasilan koordinasi kelima ini akan memudahkan pencapaian pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Terfasilitasinya pembangunan desa akan memperkuat nilai-nilai nasionalisme sebagai bagian dari NKRI.

Kelima fokus koordinasi yang akan diselenggarakan oleh Kemenko PMK dimaksudkan untuk memudahkan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang PMK yang terkait dengan K/L dan menjadi Tusi Kemenko PMK sekaligus secara logis memudahkan, mengefisienkan, dan mengefektifkan pencapaian pembangunan yang termaktub dalam agenda pembangunan nasional.

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia yang ditempuh melalui jalan TRISAKTI adalah upaya untuk mewujudkan Warga Negara yang memiliki jiwa kebangsaan dalam kehidupan demokrasi Indonesia, Warga Negara yang berdikari dalam perekonomian yang berkeadilan, dan mewujudkan Bangsa yang bergotong royong dan ber-Bhinneka Tunggal Ika. Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia, akan dilaksanakan dalam kerja nyata melalui upaya kerjasama seluruh komponen bangsa, kebijakan negara, program-program pemerintah, dan melibatkan partisipasi seluruh rakyat Indonesia. Hasil atau wujud pembangunan manusia dan kebudayaan tersebut mengarahkan Peran Kemenko PMK dalam memfasilitasi pencapaian PMK dalam berbagai dimensinya.

Sesuai dengan sasaran strategis RPJMN 2015-2019, maka pembangunan manusia dan kebudayaan merupakan salah satu komponen strategis untuk mencapai visi pembangunan, yaitu mencapai kesejahteraan rakyat. Arah kebijakan pembangunan nasional (RPJMN 2015–2019) yang terkait dengan pembangunan manusia dan kebuadayaan, merupakan dasar pertimbangan Kemenko PMK dalam menetapkan kerangka pikir dan arah kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan tahun 2015–2019. Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, serta mengacu pada RPJMN 2015–2019, maka Kemenko PMK menetapkan arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran strategisnya sebagai berikut:

1. Untuk mencapai sasaran strategis "Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar", ditetapkan arah kebijakan "Peningkatan peran koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian untuk perumusan, penetapan, dan pelaksanaan pembangunan manusia dan kebudayaanPemenuhan Kebutuhan dasar dan Pelayanan Dasar", dengan strategi sebagai berikut:
   a. Meningkatkan komunikasi kelembagaan serta meningkatkan keterlibatan K/L dalam pelaksanaan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan pemenuhan dasar serta pelayanan dasar masyrakat.
   b. Meningkatkan Keterlibatan serta kualitas pengendalian dengan K/L dalam pengedalian kebijakan Pemenuhan Kebutuhan dasar dan pelayanan dasar masyarakat.
2. Untuk mencapai sasaran strategis "Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan untuk mendukung kemantapan pemberdayaan", ditetapkan arah kebijakan "Peningkatan peran koordinasi, sinkronisasi, pengendalianuntuk perumusan, penetapan dan pelaksanaan pembangunan manusia dan kebudayaan pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan generasi muda" dengan strategi sebagai berikut:
   a. Meningkatkan komunikasi kelembagaan serta meningkatkan keterlibatan K/L dalam pelaksanaan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan Masyarakat (ibu dan keluarga), Perempuan, dan Generasi muda
   b. Meningkatkan Keterlibatan serta kualitas pengendalian dengan K/L dalam pengedalian kebijakan Pemberdayaan Masyarakat (ibu dan keluarga), Perempuan, dan Generasi muda.
3. Untuk mencapai sasaran strategis "Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong", ditetapkan arah kebijakan "Peningkatan peran koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian untuk

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan pembangunan manusia dan kebudayaan penguatan kesetiawanaan sosial dan kebudayaan", dengan strategi sebagai berikut:

a. Meningkatkan komunikasi kelembagaan serta meningkatkan keterlibatan K/L dalam pelaksanaan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan untuk memperkuat kesetiakawanan sosial, peran lembaga sosial, serta partisipasi masyarakat dalam penemuan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
b. Meningkatkan keterlibatan serta kualitas pengendalian dengan K/L dalam pengendalian kebijakan penguatan kesetiakawanan sosial, peran lembaga sosial, serta partisipasi masyarakat dalam penemuan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

4. Untuk mencapai sasaran "Meningkatnya efektivitas manajemen organisasi Kemenko PMK", ditetapkan arah kebijakan "Memperkuat sistem tata kelola organisasi", dengan strategi melanjutkan dan memperkuat penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
5. Untuk mencapai sasaran "Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan anggaran pada kemenko PMK", ditetapkan arah kebijakan "Penguatan manajamen anggaran untuk mendukung keseluruhan kegiatan Kemenko PMK", dengan strategi sebagai berikut:
   a. Meningkatkan mutu perencanaan dan penganggaran.
   b. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran.
   c. Memperkuat sistem pengawasan internal.

Rekapitulasi arah kebijakan dan strategi Kemenko PMK untuk mencapai sasaran-sasaran strategis Kemenko PMK 2015-2019 dapat dilihat pada Matriks 1. Berdasarkan keseluruhan paparan dari arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang ditujukan untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Nasional, maka terdapat keterkaitan yang jelas dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi, serta Program dan Kegiatan yang akan dilakukan Kemenko PMK dalam mewujudkan dan melaksanakan mandat yang telah ditetapkan.

Program dan Kegiatan

Penyusunan program dan kegiatan dalam Rencana Strategis Kemenko PMK 2015-2019 mengacu pada strategi yang telah dipilih dalam rangka mewujudkan setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan. Untuk mencapai

sasaran strategis, Kemenko PMK akan melaksanakan satu program teknis, yaitu "Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan" dan satu program generik, yaitu "Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Lingkungan Kemenko PMK".

Program teknis Kemenko PMK akan memayungi berbagai kegiatan-kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian (KSP) yang dilaksanakan oleh unit kerja Deputi yang melaksanakan lima tahapanproses bisnisdari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, yaitu: penyusunan program dan kegiatan, identifikasi masalah, pelaksanaan KSP, monitoring dan evaluasi, serta penyusunan rumusan kebijakan. Sedangkan Program Generik merupakan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Kemenko PMK yang mencakup fungsi-fungsi pengelolaan pengembangan dan manajemen sumber daya manusia, manajemen bisnis dan proses organisasi, manajemen aset dan sarana kegiatan, pelayanan kehumasan dan hukum, manajemen keuangan, penyusunan program kerja, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.Program generik melaksanakan empat tahapanproses bisnis, yaitu: persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan. Hubungan antara program teknis dan program generik Kemenko PMK dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kemenko PMK diperlihatkan pada Gambar 5.

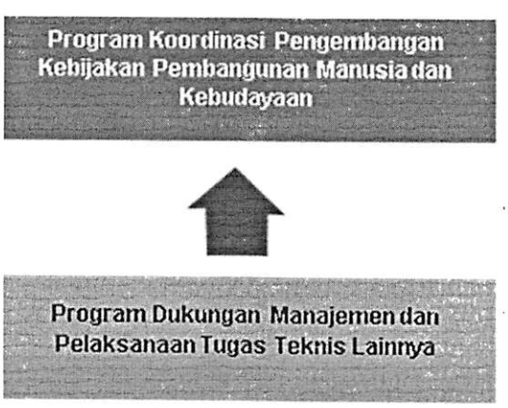

Gambar 5.Hubungan antara Program Teknis dengan Program Generik

Rekapitulasi program dan kegiatan Kemenko PMK dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kemenko PMK, baik bersifat teknis maupun generik dalam kurun waktu 2015-2019 diuraikan pada Matriks 2.

Berdasarkan hasil pemetaan tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi Kemenko PMK, maka dapat diinventarisasi kebutuhan program

dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran strategis 2015-2019, sebagai berikut:

1. Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dengan kegiatan:
   a. Koordinasi kebijakan pengurangan risiko bencana.
   b. Koordinasi kebijakan tanggap cepat bencana.
   c. Koordinasi kebijakan penanganan pascabencana.
   d. Koordinasi kebijakan konflik sosial.
   e. Koordinasi kebijakan penanganan kemiskinan.
   f. Koordinasi kebijakan penguatan kompensasi sosial.
   g. Koordinasi kebijakan jaminan sosial.
   h. Koordinasi kebijakan pemberdayaan disabilitas dan lanjut usia.
   i. Koordinasi kebijakan ketahanan gizi, kesehatan ibu dan anak, dan kesehatan lingkungan.
   j. Koordinasi kebijakan pelayanan kesehatan.
   k. Koordinasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan penyakit.
   l. Koordinasi kebijakan kependudukan dan KB.
   m. Koordinasi kebijakan pendidikan menengah dan keterampilan bekerja.
   n. Koordinasi kebijakan PAUD, Dikdas, dan pendidikan masyarakat.
   o. Koordinasi kebijakan pendidikan tinggi dan pemanfaatan Iptek.
   p. Koordinasi kebijakan pemberdayaan dan kerukunan umat beragama.
   q. Koordinasi kebijakan pembinaan umat beragama, pendidikan agama, dan keagamaan.
   r. Koordinasi kebijakan kepemudaan.
   s. Koordinasi kebijakan warisan budaya.
   t. Koordinasi kebijakan nilai dan kreativitas budaya.
   u. Koordinasi kebijakan keolahragaan.
   v. Koordinasi kebijakan kesejahteraan dan ketahanan keluarga.
   w. Koordinasi kebijakan pemberdayaan perempuan.
   x. Koordinasi kebijakan pemenuhan hak dan perlindungan perempuan.
   y. Koordinasi kebijakan pemenuhan hak dan perlindungan anak.
   z. Koordinasi kebijakan pemberdayaan masyarakat.
   aa. Koordinasi kebijakan pemberdayaan desa.
   bb. Koordinasi kebijakan pemberdayaan kawasan perdesaan.
   cc. Koordinasi kebijakan pemberdayaan kawasan strategis dan khusus.
   dd. Koordinasi penanganan masalah strategis.
   ee. Penataan kelembagaan jaminan sosial (SJSN).

ff. Sekretariat koordinasi kebijakan pembangunan desa dan kawasan perdesaan.

gg. Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS.

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko PMK, dengan kegiatan:
   a. Peningkatan dan pengelolaan urusan informasi dan persidangan.
   b. Penyelenggaraan penyusunan program dan anggaran, penyusunan data, pelaporan, dan administrasi kerjasama.
   c. Peningkatan dan pengelolaan pelayanan umum.
   d. Pengawasandan peningkatan akuntabilitas Kemenko PMK.
   e. Penyelenggaraan pembinaan Korpri.
   f. Koordinasi kajian dan telaahan bidang PMK.
   g. Pembangunan/pengadaan/peningkatan sarana dan prasarana.

C. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan tinjauan seluruh peraturan penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di Kemenko PMK untuk mengetahui kekurangan muatan peraturan tersebut yang berpotensi mengakibatkan penyelenggaraan kegiatan berlangsung kurang optimal. Upaya perbaikan terhadap muatan peraturan itu dapat mengarah pada amandemen berbagai regulasi terkait. Perbaikan atau penyempurnaan regulasi yang dilakukan diharapkan dapat meminimalkan kendala dalam operasional penyelenggaraan kegiatan dan memaksimalkan pencapaian *output* dan hasil kegiatan tersebut.

Sejalan dengan RPJMN 2015-2019, sinergi antara kebijakan dan kerangka regulasi dilakukan untuk memantapkan pembangunan nasional di berbagai bidang pembangunan, dengan tujuan untuk mewujudkan daya saing perekonomian berlandaskan sumber daya alam, sumber daya manusia berkualitas, dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sinergi kebijakanjuga dimaksudkan untuk mendorong harmonisasi dan penyelarasan kebijakan yang memaksimalkan capaian sebagai wujud pengukuran kinerja PMK, dan menjadi katalisator sekaligus pemampu (*enabler*) bagi pihak terkait yang secara faktual memiliki irisan sasaran strategis, program, dan kegiatan dalam PMK.

Kemenko PMK memiliki peran koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan

kebijakan yang mendukung efektivitas perencanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan nasional bidang Manusia dan kebudayaan. Terkait dengan 13 subagenda PMK sebagai penjabaran dari Nawacita, maka terdapat minimal 8 K/L yang berada di bawah koordinasi Kemenko PMK. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, koordinasi Kemenko PMKmencakup:1) Kementerian Agama; 2) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 3) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; 4) Kementerian Kesehatan; 5) Kementerian Sosial; 6) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 7) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 8) Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan Instansi lain yang dianggap perlu.

Dalam memantapkan upaya untuk mensinergikan kebijakan dalam kerangka regulasi, beberapa prinsip perlu diterapkan secara konsisten dan konsekuen adalah:

1. Penyusunan Kerangka Regulasi dilakukan dengan mempertimbangkan dampak, biaya, manfaat, dan kerugiannya untuk masyarakat. Regulasi yang berkualitas, sederhana, tertib, dan transparan akan menciptakan dinamika sosial dan ekonomi masyarakat yang terselenggara secara optimal.
2. Kerangka Regulasi disusun dengan mempertimbangkan asas pembentukandan asas materi peraturan perundang-undangan yang baik.
3. Penyusunan Kerangka Regulasi dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait.
4. Kerangka Regulasi Jangka Menengah berisi kebutuhan Regulasi dan/atau arah kerangka regulasi yang akan dibentuk sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
5. Kerangka Regulasi Tahunan berisi kebutuhan regulasi dan/atau regulasi di bawah Undang-Undang yang dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahunan untuk mewujudkan pemenuhan RPJMN.

Kemenko PMK dalam menjalankan peran, tugas, dan fungsi yang telah diamanatkan akan mematuhi sejumlah regulasi yang berlaku, yaitu regulasi yang mengatur Kemenko PMK dalam melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan K/L terkait. Selanjutnya berdasarkan taat asas hukum dan legaiitas, maka Kemenko PMK memperjelas peran sehingga

memberikan kemudahan, keefektifan, dan penguatan kerjasama dengan K/L secara maksimal. Untuk memperjelas pelaksanaan peran Kemenko PMK sebagai koordinator, maka kebutuhan kerangka regulasi Kemenko PMK dijabarkan pada Matriks 3. Selanjutnya regulasi mengenai penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian terkait sinergitas dengan K/L yang menjadi mitra dalam merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan PMK, meliputi:

1. Penyiapan kebijakan mengenai kerawanan sosial dan dampak bencana
2. Penyiapan kebijakan mengenai penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial
3. Penyiapan kebijakan mengenai peningkatan kesehatan dan perilaku hidup sehat.
4. Penyiapan kebijakan mengenai pendidikan dan agama, serta kehidupan kerukunan beragama.
5. Penyiapan kebijakan mengenai kebudayaan dan partisipasi penguatan kebudayaan.
6. Penyiapan kebijakan mengenai perlindungan perempuan dan anak melalui penguatan Pengarusutamaan Gender yang diharapkan dapat memberdayakan perempuan dan kualitas remaja puteri, terpenuhinya hak-hak perempuan, dan menjadi faktor pengungkit bagi terciptanya pembangunan manusia Indonesia.
7. Penyiapan kebijakan mengenai pemberdayaan masyarakat, desa, dan kawasan.
8. Penyiapan kebijakan mengenai pembinaan generasi muda untuk mewujudkan manusia yang unggul dan berkualitas dengan karakter mampu menguatkan ke-Indonesia-an kita, kemampuan menyaring terhadap derasnya arus globalisasi, dan kecintaan pada tanah air.

Penyiapan kebijakan mengenai penyediaan data yang *valid, reliable,* dan disepakati bersama dalam bentuk pengelolaan data terintegrasi memanfaatkan sistem manajemen informasi berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) pada fokus-fokus koordinasi program kegiatan yang dilakukan oleh K/L, yaitu pada fokus (i) Jaminan Kebutuhan dan Pelayanan Dasar, (ii) Pemberdayaan Masyarakat, (iii) Pembangunan Desa Semesta, dan (iv) Pembangunan Manusia Berkarakter.

D. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan adalah perangkat K/L berupa struktur organisasi, ketatalaksanaan dan pengelolaan aparatur sipil negara, yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi K/L yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional.

Kerangka kelembagaan Kemenko PMK memaparkan kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian sasaran strategis, tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal, serta pengelolaaan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya mengenai pengelolaan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, baik itu secara kualitas maupun kuantitas. Organisasi mencakup rumusan tugas, fungsi, kewenangan, peran, dan struktur.

Pengaturan hubungan inter dan antar-organisasi mencakup aturan main/tata hubungan kerja inter dan antar-organisasi/lembaga pemerintah. Sedangkan sumber daya manusia aparatur negara mencakup para pejabat negara dan aparatur sipil negara yang menjalankan organisasi tersebut.

Berdasarkan analisis kebutuhan terhadap pelayanan yang diselenggarakan oleh Kemenko PMK, maka ditemukan bahwa terdapat kebutuhan dari *stakeholder* PMK agar Kemenko PMK memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk meningkatkan peran dan Tusi koordinasi dan sinkronisasi dalam merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan PMK.Kondisi tersebut berimplikasi pada kebutuhan proses kerja yang sistematis, tata laksana organisasi yang memberikan jaminan akuntabilitas manajemen, penyediaan data dan informasi yang valid dan *reliable* yang didukung sumber daya manusia (SDM) yang profesional, serta teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang modern. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka kerangka kelembagaan Kemenko PMK diarahkan untuk mengawal lima fokus koordinasi dalam pelaksanaan agenda pembangunan di bidang PMK, yaitu kelembagaan yang mampu menopang dan mengefektifkan: (i) keterpaduan basis data dan informasi, (ii) fasilitasi penjaminan Kebutuhan dan Pelayanan Dasar, (iii) fasilitasi Pembangunan Manusia Berkarakter, (iv) fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat, dan (v) fasilitasi Pembangunan Desa Semesta. Efektivitas kelembagaan yang menjalankan lima fokus koordinasi tersebut, tercermin pada meningkatnya kualitas pelayanan publik Kemenko PMK yang terindikasi pada: (i) Kemantapan Pelayanan, (ii) Kemantapan Pemberdayaan, (iii) dan Kemantapan perilaku Gotong Royong. Berlandaskan

arah dan kerangka pemikiran tersebut, maka terdapat beberapa kebutuhan penyempurnaan ke depan terkait kerangka kelembagaan PMK. Kelembagaan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah ditetapkan berdasarkan Perpres nomor 9 tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Dalam Perpres tersebut, pengaturan kelembagaan mencakup: kedudukan tugas dan fungsi organisasi, tata kerja, dan pendanaan. Struktur organisasi Kementerian Koordinator berdasarkan Perpres dimaksud dapat dilihat pada Matriks 4.

1. Kebutuhan Tata Laksana

   Dalam upaya pencapaian sasaran strategis, Kemenko PMK membutuhkan penataan tata laksana sebagai berikut:

   a. Perlunya integrasi proses bisnis dalam penyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi dan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan yang lebih mengedepankan pendekatan fungsional dan holistik, dan meminimalkan budaya tersekat-sekat (pendekatan sektoral).
   b. Perlunya pembangunan sistem prosedur penjaminan kualitas perencanaan, penyusunan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kemenko PMK untuk memastikan pengendalian mutu yang ekonomis, efektif dan efisien.
   c. Perlunya penetapan standar dan prosedur yang seragam dan sesuai dengan ketentuan dalam koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan yang melibatkan interaksi kelembagaan antara Kemenko PMK dan K/L terkait.
   d. Perlunya penelaahan mendalam atas *standard operating procedure* (SOP) di Kemenko PMK khususnya pada proses bisnis inti untuk memitigasi risiko-risiko dalam penyelenggaraan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dan perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan oleh Kemenko PMK.

2. Kebutuhan Pengelolaan Sumber Daya Manusia

   Dalam upaya pencapaian sasaran strategis, Kemenko PMK membutuhkan penataan sistem pengelolaan SDM Kemenko PMK sebagai berikut:

a. Perlunya penyelarasan strategi pengelolaan dan pengembangan SDM dengan renstra Kemenko PMK2015-2019, yakni menjadikan fungsi pengelolaan SDM yang bersifat lebih strategis (menjadi *strategic business partner*). Fungsi pengelolaan SDM yang strategis bermakna tidak hanya mengerjakan tugas administratif belaka, namun juga melakukan perencanaan dan pengembangan SDM yang dibutuhkan Kemenko PMK, antara lain:
   1) Menyempurnakan dan mengembangkan analisis jabatan,
   2) Membangun standar kompetensi jabatan,
   3) Menganalisis kesenjangan kompetensi (*competency gap analysis*),
   4) Merencanakan kebutuhan pegawai berdasarkan analisis beban kerja (*work load analysis*), khususnya untuk penyelenggaraan kegiatan Kemenko PMK,
   5) Merencanakan pengembangan pegawai (gelar dan non-gelar),
   6) Menyempurnakan sistem karir dan perencanaan suksesi (*succession planning*),
   7) Menyempurnakan kebijakan dan prosedur SDM yang selaras dengan kebutuhan organisasi dan strategi Kemenko PMK,
   8) Menyempurnakan sistem informasi pengelolaan SDM (*Human Resource Information System*) yang dapat mendukung program kerja fungsi SDM 2015-2019,
   9) Menjadikan fungsi pengelolaan SDM yang bersifat lebih strategis (menjadi *strategic business partner*). Fungsi pengelolaan SDM yang strategis bermakna tidak hanya mengerjakan tugas administratif belaka, namun juga melakukan perencanaan dan pengembangan SDM yang dibutuhkan Kemenko PMK.
      a. Untuk mencapai sasaran strategis, maka Kemenko PMK perlu membangun standar kompetensi jabatan bagi seluruh jabatan, membangun perangkat asesmen kompetensi dan modul pelatihan dan pembinaan,
      b. Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Kemenko PMK 2015- 2019, maka Kemenko PMK memerlukan penyempurnaan kebijakan dan prosedur SDM yang selaras dengan kebutuhan organisasi dan sasaran strategi kemenko PMK,
      c. Perlunya penyempurnaan kebijakan dengan menekankan pada pembangunan keunggulan kompetitif SDM yang menggunakan

kemampuan Iptek dan dapat menyesuaikan diri terhadap berbagai perubahan lingkungan internal dan eksternal Kemenko PMK.

3. Kebutuhan Fungsi dan Struktur Organisasi

Dalam upaya pencapaian sasaran strategis, Kemenko PMK membutuhkan penataan fungsi dan struktur organisasi Kemenko PMK sebagai berikut:

a. Terkait dengan perubahan nomenklatur dari Kemenko Kesra ke Kemenko PMK, maka perlu penguatan fungsi unit kerja yang menangani restrukturisasi organisasi dengan tugas mengatur dan melakukan pengkajian dan pengembangan struktur organisasi dan tata kerja, manajemen perubahan, dan pengelolaan restrukturisasi organisasi. Hal ini terkait juga dengan perubahan tugas dan fungsi seiring adanya perubahan K/L di bawah Kemenko PMK, maka diperlukan penyusunan struktur organisasi beserta tugas dan fungsi yang spesifik.
b. Dalam rangka membangun pegawai Kemenko PMK yang profesional dan berintegritas, maka Kemenko PMK perlu mengoptimalkan integrasi dan sinergi penguatan fungsi yang mengembangkan SDM aparatur dan sistem pengelolaan SDM aparatur secara komprehensif dan terintegrasi.
c. Penataan Tusi yang jelas untuk mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pekerjaan dan beban pekerjaan yang berlebih,
d. Perlunya evaluasi organisasi untukmemastikan kesesuaian dan efektivitas restrukturisasi organisasi dan tata kerja Kemenko PMK dengan Visi dan Misi Kemenko PMK yang diterjemahkan dalam berbagai tujuan dan sasaran strategis,
e. Perlunya kajian pembentukan Jabatan Fungsional Umum (JFU) dan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) untuk mengoptimalkan penjaminan kualitas di setiap unit kerja deputi, baik dari sisi proses maupun keluaran dari penjaminan kualitas dalam perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan Renstra Kemenko PMK 2015–2019 diukur dengan berbagai indikator kinerja beserta target kinerjanya. Target yang ditetapkan untuk indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program, dan indikator kinerja kegiatan diuraikan sebagai berikut.

1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis

   Indikator kinerja sasaran strategis Kemenko PMK untuk Pembangunan Jangka Menengah periode 2015–2019 merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran strategis Kemenko PMK dalam kurun waktu tersebut. Adapun indikator kinerja sasaran strategis Kemenko PMK 2015–2019 disertai target kinerjanya diuraikan pada Matriks 5.

2. Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan

   Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka dalam kurun waktu 2015–2019, Kemenko PMK akan menjalankan satu program teknis dan satu program generik seperti yang telah dipaparkan pada Bab III.

   Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program teknis dan program generik tersebut, disertai masing-masing kegiatan ini perlu ditetapkan dengan Indikator Kinerja Program (IKP) dan indikator kinerja kegiatan (IKK). Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program pada unit kerja Eselon I. Indikator Kinerja Program ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program. Sedangkan Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan pada satuan kerja Eselon II. Indikator Kinerja Kegiatan ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja yang berkaitan dengan sasaran kegiatan.

   Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan dari masing-masing program dan kegiatan Kemenko PMK dalam kurun waktu 2015–2019 dapat dilihat pada Matriks 6.

B. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan merupakan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai sasasaran strategis Kemenko PMK. Adapun kerangka pendanaan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan keseluruhan program dan kegiatan Kemenko PMK disajikan pada Matriks 7.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Tahun 2015-2019, disusun dengan mengacu kepada arah kebijakan pembangunan nasional RPJMN 2015-2019.Arah kebijakan pembangunan nasional tersebut merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Renstra Kemenko PMK 2015-2019 mencerminkan upaya peningkatan dan optimalisasi peran Kemenko PMK sesuai Perpres Nomor 9 tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam menjalankan tugas dan fungsi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu pembangunan manusia dan kebudayaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu pembangunan manusia dan kebudayaan.

Sebagai cerminan dari upaya tersebut, Kemenko PMK telah mencanangkan visi untuk periode 2015–2019, yaitu: "Menjadi koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berdasarkan Gotong Royong". Untuk dapat mewujudkan visi ini, Kemenko PMK telah merumuskan dua pernyataan misi, yaitu: (1) Mengoordinasikan dan menyinkronisasikan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan; dan (2) Meningkatkan kapasitas kelembagaan Kemenko PMK. Visi dan Misi Kemenko PMK sebagaimana diuraikan di atas, mengacu dan selaras dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang tertuang dalam RPJMN 2015–2019. Penetapan Visi dan Misi Renstra Kemenko PMK Tahun 2015–2019 tersebut juga didasarkan pada ketentuan penyusunan Renstra sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra Kementerian dan Lembaga Tahun 2015–2019.

Dengan demikian, Kemenko PMK yang memiliki bisnis utama koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang PMK, akan melaksanakan mandat sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2015–2019. Penyelenggaraan pelaksanaan bisnis utama tersebut dapat diindikasikan pencapaiannya melalui Trimantap, yaitu: mantap pelayanan, mantap pemberdayaan, dan mantap kegotongroyongan.

B. Arahan Pimpinan dan Pelaksanaan Renstra

Mandat penyelenggaraan koordinasi kelembagaan yang diamanatkan kepada Kemenko PMK demikian luas dan melibatkan banyak K/L. Hal ini dimaklumi mengingat luasnya dinamika pembangunan PMK, luasnya irisan dan keterkaitan antar unsur-unsur atau komponen-komponen pembentuk kualitas PMK, keterpaduan yang tak terpisahkan antara kualitas fisik dan nonfisik dalam PMK, dan keterkaitan yang tak terpisahkan antara dimensi masyarakat dengan individu, keterkaitan antar waktu, serta keterkaitan antar wilayah. Untuk itu Kemenko PMK perlu membuat fokus penyelenggaraan koordinasi yang memiliki karakteristik dan dapat berkontribusi serta berdampak luas pada pencapaian pembangunan nasional secara keseluruhan.

Mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan eksternal, masalah dan potensi, isu strategis sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan kondisi umum, tantangan pembangunan nasional, agenda pembangunan (Nawacita) maupun sub agenda dan sasaran pembangunan yang terkait dengan pembangunan manusia dan kebudayaan, serta mandat koordinasi yang diamanatkan kepada Kemenko PMK dalam RPJMN 2015-2019, maka Kemenko PMK mengelompokkan secara garis besar lima fokus koordinasi program dan kegiatan dalam agenda kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan. Lima fokus koordinasi tersebut adalah: 1) Selaras Basis Data, 2) Jaminan Kebutuhan dan Pelayanan Dasar, 3) Pembangunan Manusia Berkarakter, 4) Pemberdayaan Masyarakat, dan 5) Pembangunan Desa Semesta.

Fokus tersebut dijabarkan ke dalam tujuan strategis Kemenko PMK untuk periode 2015– 2019, yakni:

1. Meningkatnya kualitas koordinasi sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan.
2. Tercapainya birokrasi yang handal, terpercaya, dan akuntabel pada Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Secara operasional, pelaksanaan seluruh program dan kegiatanKemenko PMKdalam rangka mewujudkan tujuan strategis sebagaimana yang telah ditetapkan di atas, selama ini memiliki tiga karakteristik utama, yaitu: 1) Koordinasi kebijakan dan regulasi, terkait dengan tugas dan fungsi generik K/L di bawah koordinasi Kemenko PMK; 2) Koordinasi permasalahan yang aktual dan *urgent*; serta 3) Koordinasi program/kegiatan yang bersifat terobosan dan percepatan.

C. Mekanisme Evaluasi atas Renstra

Keberhasilan pelaksanaan Program dan kegiatan Renstra Kemenko PMK 2015–2019 membutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran Kemenko PMK. Keinginan kuat untuk melakukan perubahan yang bersifat strategis di *level* Kemenko PMK merupakan bentuk nyata dari komitmen yang tinggi tersebut. Untuk itu dalam Renstra Kemenko PMK 2015–2019, setiap tujuan strategis dikaitkan dengan sejumlah sasaran strategis, indikator kinerja sasaran strategis, arah kebijakan serta program dan kegiatan. Program dan kegiatan telah disusun dengan mempertimbangkan kondisi, potensi, dan permasalahan terkini. Untuk memastikan agar seluruh program dan kegiatan masing-masing menghasilkan *outcome* dan *output* yang diharapkan, proses pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja organisasi yang dikaitkan dengan pelaksanaan Renstra ini harus berjalan secara berkelanjutan.

Pemantauan dan evaluasi kinerja hasil pelaksanaan Renstra Kemenko PMK 2015–2019 harus berlangsung dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja.

Oleh karena itu, secara lebih operasional, Renstra Kemenko PMK 2015-2019 akan dijabarkan lebih lanjut setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja Tahunan Kemenko PMK. Renstra dan Rencana Kerja Kemenko PMK inilah yang menjadi pedoman utama seluruh unit kerja dilingkungan Kemenko PMK dalam menjabarkan isu-isu strategis yang perlu dikoordinasikan, disinkronisasikan, dan dikendalikan dalam lima fokus koordinasi yang disusun dalam Renstra dan Rencana Kerja Tahunan Unit Kerja, hingga dijabarkan dalam Perjanjian Kinerja untuk setiap pejabat Eselon I dan II di lingkungan Kemenko PMK. Melalui mekanisme tersebut, seluruh insan Kemenko PMK harus menyadari bahwa mereka memiliki komitmen yang dibutuhkan untuk melakukan perubahan, serta memiliki budaya untuk menghasilkan kinerja tinggi. Dengan modal ini, Kemenko PMK optimis bahwa seluruh target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kemenko PMK 2015-2019 ini dapat diraih dan akan memberikan dampak kepada kesuksesan seluruh program pemerintah dalam RPJMN ketiga periode 2015-2019.

Matriks 1. Matriks Keterkaitan Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan, dan Strategi Kemenko PMK

TUJUAN		SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
T.1.	Meningkatnya kualitas koordinasi sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan.	SS.1. Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar.	Peningkatan peran koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian untuk perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan PMK dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan dasar.	1. Meningkatkan komunikasi kelembagaan serta meningkatkan keterlibatan K/L dalam pelaksanaan kebijakan pemenuhan dasar serta pelayanan dasar masyarakat. 2. Meningkatkan Keterlibatan serta kualitas pengendalian dengan K/L dalam pengendalian kebijakan pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan dasar masyarakat.

TUJUAN		SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
		SS.2. Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan untuk mendukung kemantapan pemberdayaan.	Peningkatan peran koordinasi, sinkronisasi, pengendalian untuk perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan PMK dalam pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan generasi muda.	1. Meningkatkan komunikasi kelembagaan serta meningkatkan keterlibatan K/L dalam pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat (ibu dan keluarga), perempuan, dan generasi muda. 2. Meningkatkan kleterlibatan serta kualitas pengendalian dengan K/L dalam pengendalian kebijakan pemberdayaan masyarakat (ibu dan keluarga), perempuan, dan generasi muda.

TUJUAN		SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
		SS.3. Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong.	Peningkatan peran koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian untuk perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan PMK dalam penguatan kesetiakawanan sosial dan kebudayaan.	1. Meningkatkan komunikasi kelembagaan serta meningkatkan keterlibatan K/L dalam pelaksanaan kebijakan untuk memperkuat kesetiakawanan sosial, peran lembaga sosial serta partisipasi masyarakat dalam penemuan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Meningkatkan keterlibatan serta kualitas pengendalian dengan K/L dalam pengendalian kebijakan penguatan kesetiakawanan sosial, peran lembaga social, serta partisipasi masyarakat dalam penemuan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
T.2.	Tercapainya birokrasi yang handal, terpercaya dan akuntabel.	SS.4. Meningkatnya efektivitas Birokrasi Kemenko PMK.	Memperkuat sistem tata kelola organisasi.	Melanjutkan dan memperkuat penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

TUJUAN		SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
		SS.5. Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan anggaran pada Kemenko PMK.	Penguatan manajamen anggaran untuk mendukung keseluruhan kegiatan Kemenko PMK	1. Meningkatkan mutu perencanaan dan penganggaran. 2. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran. 3. Memperkuat sistem pengawasan internal.

Matriks 2 Matriks Program dan Kegiatan Kemenko PMK

TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
T.1. Meningkatnya kualitas koordinasi sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan.	SS.1. Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar.	Peningkatan peran koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian untuk perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan PMK dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan dasar.	1. Meningkatkan komunikasi kelembagaan serta meningkatkan keterlibatan K/L dalam pelaksanaan kebijakan pemenuhan dasar serta pelayanan dasar masyrakat. 2. Meningkatkan Keterlibatan serta kualitas pengendalian dengan K/L dalam pengendalian kebijakan pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan dasar masyarakat.	Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.	Keseluruhan kegiatan koordinasi kebijakan di tingkat Eselon II dalam bidang teknis pembangunan manusia dan kebudayaan.

TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
	SS.2. Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan untuk mendukung kemantapan pemberdayaan.	Peningkatan peran koordinasi, sinkronisasi, pengendalian untuk perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan PMK dalam pemberdayaan masyarakat, perempuan dan generasi muda.	1. Meningkatkan komunikasi kelembagaan serta meningkatkan keterlibatan K/L dalam pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat (ibu dan keluarga), perempuan dan generasi muda. 2. Meningkatkan keterlibatan serta kualitas pengendalian dengan K/L dalam pengedalian kebijakan pemberdayaan masyarakat (ibu dan keluarga), perempuan dan generasi muda.	Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.	Keseluruhan kegiatan koordinasi kebijakan di tingkat Eselon II dalam bidang teknis pembangunan manusia dan kebudayaan.

TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
	SS.3. Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong.	Peningkatan peran koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian untuk perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan PMK dalam penguatan kesetiawanaan sosial dan kebudayaan.	1. Meningkatkan komunikasi kelembagaan serta meningkatkan keterlibatan K/L dalam pelaksanaan kebijakan untuk memperkuat kesetiakawanan sosial, peran lembaga sosial serta partisipasi masyarakat dalam penemuan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Meningkatkan keterlibatan serta kualitas pengendalian dengan K/L dalam pengedalian kebijakan penguatan kesetiakawanan sosial, peran lembaga sosial serta partisipasi masyarakat dalam penemuan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.	Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Keseluruhan kegiatan koordinasi kebijakan di tingkat Eselon II dalam bidang teknis pembangunan manusia dan kebudayaan.

TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
T.2. Tercapainya birokrasi yang handal, terpercaya dan akuntabel.	SS.4. Meningkatnya efektivitas birokrasi Kemenko PMK.	Memperkuat sistem tata kelola organisasi.	Melanjutkan dan memperkuat penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	- Kegiatan di Biro Informasi dan Persidangan - Kegiatan di Inspektorat - Kegiatan di Biro Perencanaan dan KLN - Kegiatan di Biro Umum

TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
	SS.5. Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan anggaran pada Kemenko PMK.	Penguatan manajamen anggaran untuk mendukung keseluruhan kegiatan Kemenko PMK.	1. Meningkatkan mutu perencanaan dan penganggaran. 2. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran. 3. Memperkuat sistem pengawasan internal.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.	- Kegiatan di Biro Hukum, Informasi, dan Persidangan. - Kegiatan di Biro Perencanaan dan Kerjasama - Kegiatan di Biro Umum - Kegiatan di Inspektorat.

Matriks 3 Kerangka Regulasi

No.	Isu Strategis	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1.	Dinamika interaksi sosial dan percepatan Teknologi Informasi dan Komunikasi berkorelasi dengan problem sosial.	Regulasi yang mengatur kerawanan sosial dan dampak bencana.	Regulasi mengenai deteksi dini terkait dengan kerawanan sosial regulasi mengenai penanganan komprehensif dampak bencana dan partisipasi masyarakat.	Kemenko PMK	K/L Terkait	2015
2.	Pemantauan pelaksanaan Kebijakan Kemenko PMK.	Perlunya pemantauan kinerja K/L atas pelaksanaan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemenko PMK.	Regulasi yang mengatur tentang pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Kemenko PMK oleh K/L.	Kemenko PMK	K/L Terkait	2015
3.	Pengembangan kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.	Mengembangkan dan menyerasikan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran.	1. Rekomendasi kebijakan mengenai sosialisasi SJSN. 2. Rekomendasi kebijakan mengenai pengurangan pengangguran.	Kemenko PMK	K/L Terkait	2015

No.	Isu Strategis	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
4.	Peningkatan kesejahteraan nasional.	Perlunya pengembangan sistem perlindungan sosial yang komprehensif.	Penataan regulasi yang mendukung pengembangan sistem perlindungan sosial yang komprehensif. Beberapa regulasi terkait: UU No. 4/1979 Kesejahteraan anak, UU Nomor 3/1979 Peradilan untuk anak, UU Nomor 4/1997 Kesejahteraan penyandang cacat, UU Nomor 13/1998 Kesejahteraan Lansia, UU Nomor 23/2002 Perlindungan anak, UU Nomor 40/2004 Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU Nomor 21/2007 Penghapusan perdagangan manusia, UU Nomor 11/2009 Kesejahteraan sosial, UU Nomor 13/2011 Penanganan Fakir Miskin, UU Nomor 19/2011 Ratifikasi Konvensi Penyandang Disabilitas, dan UU Nomor 24/2011 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.	Kemenko PMK	K/L Terkait	2015

Matriks 4 Kerangka Kelembagaan

STRUKTUR ORGANISASI BERDASARKAN PERPRES NOMOR 9 TAHUN 2015

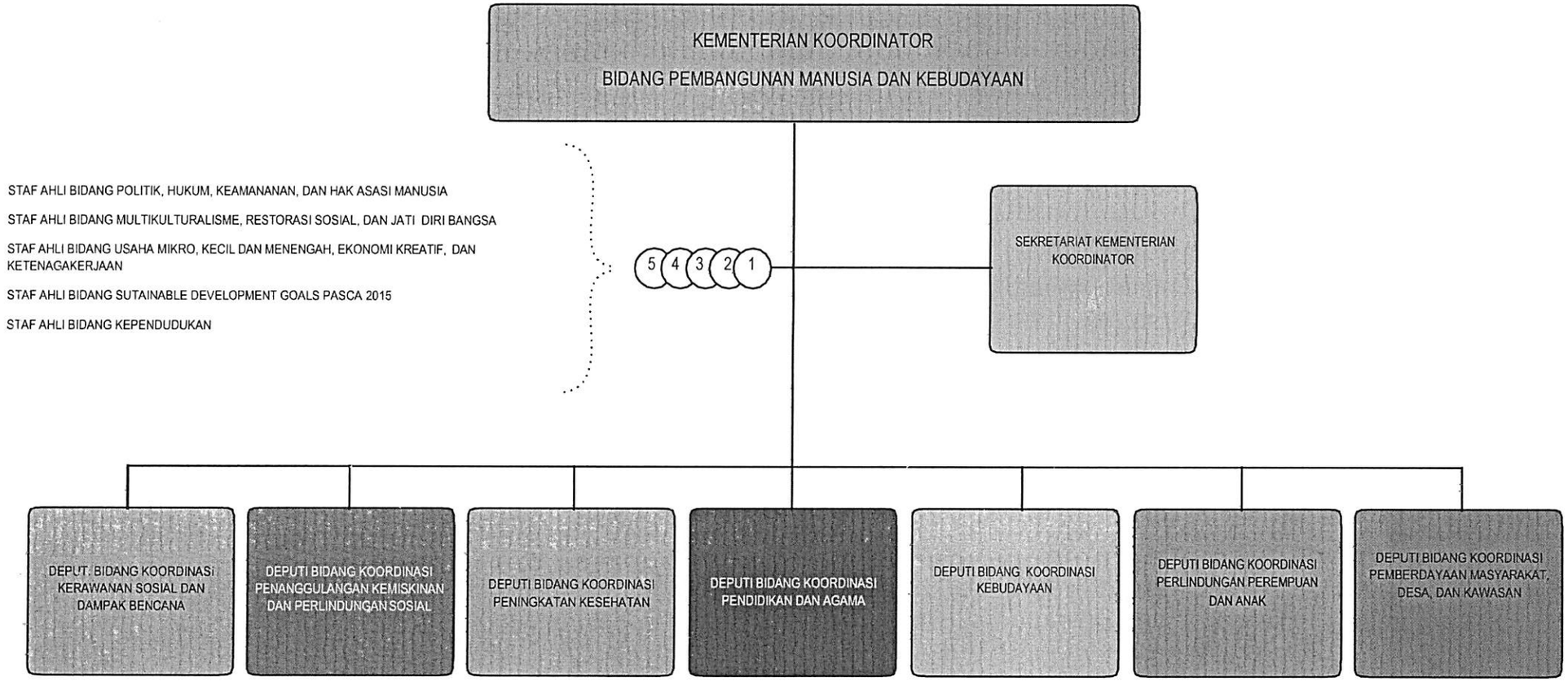

Matriks 5 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2019	Sasaran Strategis	IKSS	Target				
						2015	2016	2017	2018	2019
1	Meningkatnya kualitas koordinasi, sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan.	1. Tingkat kemantapan Pelayanan, Pemberdayaan dan Gotong Royong 2. Tingkat Capaian K/L terhadap target Indikator Pembangunan Manusia (IPM).	5,19 100%	Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar.	Tingkat capaian K/L terhadap target Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Bidang Pendidikan.	-	-	75%	100%	100%
					Tingkat capaian K/L terhadap target Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Bidang Kesehatan.	-	-	75%	100%	100%

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2019	Sasaran Strategis	IKSS	Target				
						2015	2016	2017	2018	2019
					Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan dalam mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar.	3,80 (Skala 5)	3,90 (Skala 5)	4,70 (Skala 6)	5,08 (Skala 6)	5,18 (Skala 6)

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2019	Sasaran Strategis	IKSS	Target				
						2015	2016	2017	2018	2019
2				Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan untuk mendukung kemantapan pemberdayaan.	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan dalam mendukung kemantapan pemberdayaan.	3,80 (Skala 5)	3,90 (Skala 5)	4,70 (Skala 6)	5,11 (Skala 6)	5,20 (Skala 6)

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2019	Sasaran Strategis	IKSS	Target				
						2015	2016	2017	2018	2019
3				Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong.	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong.	3,80 (Skala 5)	3,90 (Skala 5)	4,70 (Skala 6)	5,05 (Skala 6)	5,18 (Skala 6)

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2019	Sasaran Strategis	IKSS	Target				
						2015	2016	2017	2018	2019
3					Tingkat capaian K/L terhadap Indeks Kemajuan Kebudayaan (IKK).	-	100%	-	-	100%
4	Tercapainya birokrasi yang handal, terpercaya dan akuntabel.	Meningkatnya nilai Reformasi Birokrasi Kemenko PMK.	85,01	Meningkatnya efektivitas Birokrasi Kemenko PMK.	Nilai Reformasi Birokrasi (RB).	60,01	65,01	75,01	80,01	85,01
5				Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan anggaran pada Kemenko PMK.	Opini BPK terhadap laporan keuangan.	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
					Nilai SAKIP.	70,01	70,51	71,51	72,51	75,01

Matriks 6 Matriks Rencana Tindak K/L
Kementerian/Lembaga: Kementerian Koordinator Bidang PMK

Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Penanggung jawab
						Rencana	Prakiraan Maju				
K/L	Program	Kegiatan				2015	2016	2017	2018	2019	
036	01	-	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko PMK.	Terselenggaranya dukungan pelayanan perkantoran dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi koordinasi secara tertib administrasi dan mendukung sepenuhnya pelaksanaan reformasi birokrasi kementerian koordinator Bidang PMK.	Prosentase tersosialisasikannya kebijakan/kegiatan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan melalui media	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretaris Kemenko PMK
					Prosentase tersedianya layanan manajemen organisasi	-	-	100%	100%	100%	
					Tersedianya dokumen laporan hasil pengawasan	11	11	16	16	16	
					Prosentase penyampaian laporan keuangan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	
					Prosentase terpenuhinya sarpras mendukung pelaksanaan operasional perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	

Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Penanggung jawab
K/L	Program	Kegiatan				Rencana 2015	Prakiraan Maju 2016	2017	2018	2019	
036	01	-			Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan	8	8	-	-	-	Sekretaris Kemenko PMK
					Prosentase tersedianya layanan perencanaan dan pelaporan	-	-	100%	100%	100%	
		2530	Peningkatan dan Pengelolaan Informasi dan Persidangan	Terwujudnya bahan persidangan, pencatatan dan pelaporan hasil persidangan cepat dan menyeluruh	Jumlah bahan dan hasil persidangan yang dicapai dengan lengkap dan menyeluruh	11	11	-	-	-	Kepala Biro Hukum, Informasi dan Persidang-an
					Tersedianya dokumen layanan persidangan	-	-	1	1	1	
				Terwujudnya dokumen hukum, perangkat organisasi dan tatalaksana dengan tepat waktu	Jumlah dokumen kebijakan/kegiatan	1	1	-	-	-	
					Jumlah dokumen hukum, perangkat organisasi, dan tata laksana dengan tepat waktu	9	9	-	-	-	
					Jumlah dokumen bidang hukum	4	4	-	-	-	

Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Penanggung jawab
K/L	Program	Kegiatan				Rencana 2015	Prakiraan Maju 2016	2017	2018	2019	
036	01	2530			Tersedianya dokumen layanan hukum	-	-	1	1	1	Kepala Biro Hukum, Informasi dan Persidang-an
					Tersedianya dokumen layanan manajemen organisasi	-	-	1	1	1	
				Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi di bidang PMK	Pelayanan sistem pengelolaan data dan informasi di Kemenko PMK	12 bln	12 bln	-	-	-	
					Tersedianya dokumen layanan data dan informasi	-	-	1	1	1	
					Tersedianya dokumen layanan humas dan komunikasi	-	-	1	1	1	
		2531	Penyelenggaraan Penyusunan Program dan Anggaran, Pelaporan	Terwujudnya perencanaan program/ kegiatan dan anggaran yang berkualitas di lingkungan kemenko PMK	Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran	8	8	-	-	-	Kepala Biro Perenca-naan dan Kerjasama
					Tersedianya dokumen peningkatan perencanaan bidang PMK	5	5	-	-	-	

Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Penanggung jawab
						Rencana	Prakiraan Maju				
K/L	Program	Kegiatan				2015	2016	2017	2018	2019	
036	01	2531	dan Administrasi Kerjasama Luar Negeri		Tersedianya dokumen layanan perencanaan	-	-	1	1	1	Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama
				Meningkatnya monitoring dan evaluasi di lingkungan kemenko PMK	Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi kegiatan PMK	3	3	-	-	-	
					Tersediannya dokumen pelaporan bidang PMK	4	4	-	-	-	
					Tersedianya dokumen layanan pemantauan dan evaluasi	-	-	1	1	1	
				Terwujudnya peningkatan dan pengembangan kerjasama luar negeri	Tersedianya dokumen perjanjian/ kerjasama international	1	1	-	-	-	
					Tersedianya Jumlah dokumen peningkatan kerjasama Luar Negeri	5	5	-	-	-	
					Tersedianya dokumen layanan kerjasama Internasional	-	-	1	1	1	

Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Penanggung jawab
K/L	Program	Kegiatan				Rencana 2015	Prakiraan Maju				
							2016	2017	2018	2019	
036	01	2532	Peningkatan dan Pengelolaan Pelayanan Umum	Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan	Tersedianya dokumen laporan kegiatan pembinaan, pelaksanaan	7	7	-	-	-	Kepala Biro Umum
					Tersedianya dokumen layanan manajemen keuangan	-	-	1	1	1	
				Peningkatan Kualitas SDM Pegawai Kemenko PMK	Jumlah pegawai yang	207	207	-	-	-	
					Tersedianya dokumen layanan manajemen SDM	-	-	1	1	1	
			Peningkatan dan Pengelolaan Pelayanan Umum	Terselenggaranya layanan perkantoran	Dukungan layanan perkantoran, ketatausahaan, protokoler dan	12 bln	12 bln	-	-	-	
					Tersedianya dokumen layanan protokoler	-	-	1	1	1	
					Tersedianya dokumen layanan perkantoran	-	-	1	1	1	
					Tersedianya dokumen layanan manajemen BMN	-	-	1	1	1	
				Terselenggaranya pengelolaan administrasi dan	Jumlah pengelolaan administrasi dan kearsipan	11	11	-	-	-	

Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Penanggung jawab
						Rencana	Prakiraan Maju				
K/L	Program	Kegiatan				2015	2016	2017	2018	2019	
036	01	2532		kearsipan yang baik	Tersedianya dokumen layanan umum	-	-	1	1	1	Kepala Biro Umum
		2533	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Kemenko PMK	Penguatan akuntabilitas keuangan dan kinerja kemenko PMK	Tersedianya laporan hasil pemeriksaan	11	11	-	-	-	Inspektur
					Tersedianya laporan pengawasan atas pelaksanaan anggaran	7	7	-	-	-	
					Tersedianya dokumen layanan audit internal	-	-	1	1	1	
				Terciptanya inspektorat yang profesional dan handal mendukung terlaksananya wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan kemenko PMK	Jumlah auditor yang kompeten dan bersertifikat sesuai jenjang jabatan dan keahlian	5 org	5 org	-	-	-	

Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Penanggung jawab
						Rencana	Prakiraan Maju				
K/L	Program	Kegiatan				2015	2016	2017	2018	2019	
036	01	2535	Koordinasi Kajian kebijakan Bidang Pembangun-an manusia dan kebudayaan	Tersusunnya kajian kebijakan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan (RK) Bidang PMK	9	9	5	5	5	Staf Ahli
		2567	Pembangunan/ Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana	Terwujudnya sarana dan prasarana perkantoran mendukung tugas dan fungsi Kemenko PMK	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	9 unit	9 unit	-	-	-	Kepala Biro Umum
					Tersedianya peralatan dan fasilitas perkantoran	1 unit	1 unit	-	-	-	
					Tersedianya kendaraan dinas pendukung tupoksi	10 unit	10 unit	-	-	-	
					Tersedianya dokumen layanan Internal (overhead)	-	-	1	1	1	

Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Penanggung jawab
K/L	Program	Kegiatan				Rencana 2015	Prakiraan Maju				
							2016	2017	2018	2019	
036	06	-	Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan	Jumlah RK Mendukung Pelayanan Dasar, Kebutuhan Dasar, Pemberdayaan dan Gotong Royong di Bidang Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana yang dihasilkan	4	4	4	4	4	Deputi Bidang Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana
					Jumlah RK Mendukung Pelayanan Dasar, Kebutuhan Dasar, Pemberdayaan dan Gotong Royong di Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial yang dihasilkan	4	4	4	4	4	Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial
					Jumlah RK Mendukung Pelayanan Dasar, Kebutuhan Dasar, Pemberdayaan dan Gotong Royong di Bidang Peningkatan Kesehatan yang dihasilkan	4	4	4	4	4	Deputi Bidang Peningkatan Kesehatan

Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Penanggung jawab
						Rencana	Prakiraan Maju				
K/L	Program	Kegiatan				2015	2016	2017	2018	2019	
036	06	-			Jumlah RK Mendukung Pelayanan Dasar, Kebutuhan Daspar, Pemberdayaan dan Gotong Royong di Bidang Pendidikan dan Agama	5	5	5	5	5	Deputi Bidang Pendidikan dan Agama
					Jumlah RK Mendukung Pelayanan Dasar, Kebutuhan Dasar, Pemberdayaan dan Gotong Royong di Bidang Kebudayaan yang dihasilkan	4	4	4	4	4	Deputi Bidang Kebudayaan
					Jumlah RK Mendukung Pelayanan Dasar, Kebutuhan Dasar, Pemberdayaan dan Gotong Royong di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak yang dihasilkan	4	4	4	4	4	Deputi Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
					Jumlah RK Mendukung Pelayanan Dasar, Kebutuhan Dasar, Pemberdayaan dan Gotong Royong di Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan dihasilkan	4	4	4	4	4	Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan

Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Penanggung jawab
						Rencana	Prakiraan Maju				
K/L	Program	Kegiatan				2015	2016	2017	2018	2019	
036	06	2536	Koordinasi Kebijakan Penanganan Pasca Bencana	Tersusunnya usulan rekomendasi kebijakan (URK) di bidang Penanganan Pasca bencana	Jumlah usulan URK di bidang Penanganan Pasca bencana	2	2	3	3	3	Asdep Penanganan Pasca Bencana
		2537	Koordinasi kebijakan pengurangan resiko bencana	Tersusunnya URK di bidang Pengurangan Resiko Bencana	Jumlah URK di bidang Pengurangan Resiko Bencana	2	2	3	3	3	Asdep Pengurangan Resiko Bencana
		2538	Koordinasi kebijakan Pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama	Tersusunnya URK di bidang Pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama	Jumlah URK di bidang Pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama	2	2	3	3	3	Asdep Pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama

Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Penanggung jawab
						Rencana	Prakiraan Maju				
K/L	Program	Kegiatan				2015	2016	2017	2018	2019	
036	06	2539	Koordinasi kebijakan Pembinaan Umat Beragama, Pendidikan Agama dan Keagamaan	Tersusunnya URK di bidang Pembinaan Umat Beragama, Pendidikan Agama dan Keagamaan	Jumlah URK di bidang Pembinaan Umat Beragama, Pendidikan Agama dan Keagamaan	2	2	3	3	3	Asdep Pembinaan Umat Beragama, Pendidikan Agama
		2540	Koordinasi Kebijakan Tanggap Cepat Bencana	Tersusunnya URK di bidang Tanggap Cepat Bencana	Jumlah URK di bidang Tanggap Cepat Bencana	2	2	3	3	3	Asdep Tanggap Cepat Bencana
		2541	Koordinasi Kebijakan Jaminan Sosial	Tersusunnya URK di bidang Jaminan Sosial	Jumlah URK di bidang Jaminan Sosial	2	2	3	3	3	Asdep Jaminan Sosial

Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Penanggung jawab
						Rencana 2015	Prakiraan Maju				
K/L	Program	Kegiatan					2016	2017	2018	2019	
036	06	2542	Koordinasi kebijakan warisan budaya	Tersusunnya URK di bidang Warisan Budaya	Jumlah URK di bidang Warisan Budaya	2	2	3	3	3	Asdep Warisan Budaya
				Terselenggaranya Kegiatan Pekan Produk Budaya Indonesia (PPBI)	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan kegiatan PPBI	-	1	1	1	1	
				Tersosialisasinnya kegiatan Revolusi Mental kepada Masyarakat	Jumlah Laporan hasil sosialisasi & Komunikasi Publik Kegiatan Revolusi Mental	1	-	-	-	-	

Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Penanggung jawab
K/L	Program	Kegiatan				Rencana 2015	Prakiraan Maju				
							2016	2017	2018	2019	
036	06	2542	Koordinasi Kebijakan Pemberdayaan Kawasan Strategis dan Khusus	Tersusunnya URK dibidang Pemberdayaan Kawasan Strategis dan Khusus	Jumlah URK di bidang Pemberdayaan Kawasan Strategis dan Khusus	2	2	3	3	3	Asdep Pemberdayaan kawasan strategis dan khusus
				Terselenggaranya kegiatan Bhakti Kesra Nusantara	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan kegiatan Bhakti Kesra Nusantara	1	1	-	-	-	
		2544	Sekretariat koordinasi kebijakan Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan	Tersusunnya URK di bidang pemberdayaan Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan	Jumlah URK di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan	2	2	3	3	3	Asdep Pemberdayaan kawasan perdesaan

Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Penanggung jawab
						Rencana	Prakiraan Maju				
KL	Progra	Kegiata				2015	2016	2017	2018	2019	
036	06	2545	Koordinasi Kebijakan ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Tersusunnya URK ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah URK di bidang ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2	2	3	3	3	Asdep Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
				Tersusunnya dokumen Program dan administratif kegiatan di bidang Perlindungan perempuan dan anak	Jumlah Dokumen Program dan Adminsitratif Kegiatan di bidang Perlindungan perempuan dan anak	2	2	2	2	2	
		2546	Koordinasi Kebijakan Kependudukan dan KB	Tersusunnya URK bidang kependudukan dan KB	Jumlah URK di bidang kependudukan dan KB	2	2	3	3	3	Asdep Kependudukan dan KB
		2547	Koordinasi Kebijakan Pemberdayaan perempuan	Tersusunnya URK dibidang Pemberdayaan Perempuan	Jumlah URK di bidang pemberdayaan perempuan	2	2	3	3	3	Asdep Pemberdayaan perempuan

Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Penanggung jawab Kegiatan
KL	Program	Kegiatan				Rencana	Prakiraan Maju				
						2015	2016	2017	2018	2019	
036	06	2548	Koordinasi Kebijakan Pemberdayaan kawasan perdesaan	Tersusunnya URK di bidang Pemberdayaan kawasan perdesaan	Jumlah URK di bidang Pemberdayaan kawasan perdesaan	2	2	3	3	3	Asdep Pemberdayaan kawasan perdesaan
		2549	Koordinasi kebijakan Kompensasi Sosial	Tersusunnya URK di bidang Kompensasi Sosial	Jumlah URK di bidang Kompensasi Sosial	2	2	3	3	3	Asdep Kompensasi Sosial
		2550	Koordinasi Kebijakan Konflik Sosial	Tersusunnya URK di bidang Konflik Sosial	Jumlah URK di bidang Konflik Sosial	2	2	3	3	3	Asdep Konflik Sosial

Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Penanggung jawab Kegiatan
KL	Program	Kegiatan				Rencana 2015	Prakiraan Maju				
							2016	2017	2018	2019	
036	06	2551	Koordinasi Kebijakan Pemenuhan hak dan perlindungan perempuan	Tersusunnya URK di bidang Pemenuhan hak dan perlindungan Perempuan	Jumlah URK di bidang Pemenuhan hak dan perlindungan perempuan	2	2	3	3	3	Asdep Pemenuhan hak dan Perlindung-an Perempuan
		2552	Koordinasi Kebijakan Ketahanan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak dan Kesehatan Lingkungan	Tersusunnya URK di bidang Ketahanan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak dan Kesehatan Lingkungan	Jumlah URK di bidang Ketahanan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak dan Kesehatan Lingkungan	2	2	3	3	3	Asdep Kebijakan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak dan Kesehatan Lingkungan

Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Penanggung jawab Kegiatan
KL	Program	Kegiatan				Rencana 2015	Prakiraan Maju				
							2016	2017	2018	2019	
036	06	2552		Tersusunnya dokumen Program dan administratif kegiatan di bidang Peningkatan Kesehatan	Jumlah Dokumen Program dan Adminsitratif Kegiatan di bidang Peningkatan kesehatan	2	2	2	2	2	Asdep Kebijakan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak dan Kesehatan Lingkungan
		2553	Koordinasi kebijakan keolahragaan	Tersusunnya URK di bidang keolahragaan	Jumlah URK di bidang keolahragaan	2	2	3	3	3	Asdep Keolahragaan
		2554	Koordinasi kebijakan Nilai dan Kreativitas Budaya	Tersusunnya URK di bidang nilai dan kreativitas budaya	Jumlah URK di bidang nilai dan kreativitas budaya	2	2	3	3	3	Asdep Nilai dan Kreativitas Budaya

Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Penanggung jawab Kegiatan
KL	Program	Kegiatan				Rencana 2015	Prakiraan Maju				
							2016	2017	2018	2019	
036	06	2554	Koordinasi kebijakan Nilai dan Kreativitas Budaya	Tersosialisasi-nya kegiatan revolusi mental kepada Masyarakat	Jumlah Laporan hasil sosialisasi & Komunikasi Publik Kegiatan Revolusi Mental	-	1	1	-	-	Asdep Nilai dan Kreativitas Budaya
				Kajian Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM)	Tersusunnya dokumen kajian GNRM	-	-	-	1	1	
				Peningkatan Pemahaman Masyarakat tentang GNRM	Terlaksanannya Peningkatan Pemahaman Masyarakat tentang GNRM	-	-	-	1	1	
				Penguatan GNRM pada kelembagaan di Pusat dan Daerah	Terlaksanannya Penguatan GNRM pada kelembagaan di Pusat dan Daerah	-	-	-	1	1	

Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Penanggung jawab Kegiatan
KL	Program	Kegiatan				Rencana 2015	Program				
							2016	2017	2018	2019	
				Monev GNRM	Tersusunnya dokumen Monev GNRM	-	-	-	1	1	Asdep Nilai dan Kreativitas Budaya
				Terselenggara-nya kegiatan Sail	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Sail	1	-	-	-	-	
		2555	Koordinasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan	Tersusunnya URK di bidang Pelayanan Kesehatan	Jumlah URK di bidang Pelayanan Kesehatan	2	2	3	3	3	Asdep Pelayanan Kesehatan
		2556	Koordinasi Kebijakan Pemberdayaan Disabilitas dan lanjut usia	Tersusunnya URK di bidang Disabilitas dan lanjut usia	Jumlah URK di bidang Pemberdayaan Disabilitas dan lanjut usia	2	2	3	3	3	Asdep Pemberdayaan Disabilitas dan Lanjut Usia

Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Penanggung jawab Kegiatan
KL	Program	Kegiatan				Rencana 2015	Prakiraan Maju				
							2016	2017	2018	2019	
036	06	2557	Koordinasi Kebijakan Kepemudaan	Tersusunnya URK di bidang kepemudaan	Jumlah URK di bidang kepemudaan	2	2	3	3	3	Asdep Kepemudaan
				Tersusunnya dokumen Program dan administratif kegiatan di bidang Kebudayaan	Jumlah Dokumen Program dan Adminsitratif Kegiatan di bidang Kebudayaan	2	2	2	2	2	
		2558	Koordinasi kebijakan PAUD, DIKDAS dan Pendidikan Masyarakat	Tersusunnya URK di bidang PAUD, DIKDAS dan Pendidikan Masyarakat	Jumlah URK di bidang PAUD, DIKDAS dan Pendidikan Masyarakat	2	2	3	3	3	Asdep PAUD, Dikdas dan Pendidikan Masyarakat

Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Penanggung jawab Kegiatan
KL	Program	Kegiatan				Rencana 2015	Prakiraan Maju				
							2016	2017	2018	2019	
036	06	2559	Koordinasi kebijakan Pendidikan Menengah dan Keterampilan Bekerja	Tersusunnya URK di bidang Pendidikan Menengah dan Keterampilan Bekerja	Jumlah URK di bidang Pendidikan Menengah dan Keterampilan Bekerja	2	2	3	3	3	Asdep Pendidikan Menengah dan Keterampilan Bekerja
				Tersusunnya dokumen Program dan administratif kegiatan di bidang Pendidikan dan Agama	Jumlah Dokumen Program dan Adminsitratif Kegiatan di bidang Pendidikan dan Agama	2	2	2	2	2	
		2560	Koordinasi Kebijakan Pemberdayaan desa	Tersusunnya URK di bidang Pemberdayaan Desa	Jumlah URK di bidang pemberdayaan desa	2	2	3	3	3	Asdep Pemberdayaan Desa

Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Penanggung jawab Kegiatan
KL	Program	Kegiatan				Rencana 2015	Prakiraan Maju				
							2016	2017	2018	2019	
036	06	2561	Koordinasi Kebijakan Pemberdayaan masyarakat	Tersusunnya URK di bidang Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah URK di bidang Pemberdayaan Masyarakat	2	2	3	3	3	Asdep Pemberdayaan masyarakat
				Tersusunnya dokumen Program dan administratif kegiatan di bidang Pemberdayaan masyarakat, desa dan kawasan	Jumlah Dokumen Program dan Adminsitratif Kegiatan di bidang Pemberdayaan masyarakat, desa dan kawasan	2	2	2	2	2	

KL	Program	Kegiatan		Sasaran	Indikator	Target					Penanggung jawab Kegiatan
						Rencana	Prakiraan Maju				
						2015	2016	2017	2018	2019	
036	06	2562	Koordinasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan penyakit	Tersusunnya URK di bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	Jumlah URK di bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	2	2	3	3	3	Asdep Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
				Terselenggaranya layanan operational sekretariat Zoonosis	Layanan operasional sekretariat	12 bln	12 bln	12 bln	-	-	
		2563	Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS	Tersusunnya URK di bidang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS	Jumlah URK di bidang pencegahan dan penanggulangan HIV/ AIDS	1	1	-	-	-	

Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Penanggung jawab Kegiatan
KL	Program	Kegiatan				Rencana 2015	Prakiraan Maju				
							2016	2017	2018	2019	
036	06			Tersusunnya perencanaan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS	Jumlah perencanaan pencegahan dan penanggulangan HIV/ AIDS	1	1	-	-	-	Asdep Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
				Tersusunnya laporan nasional penanggulangan HIV/AIDS	Jumlah laporan nasional penanggulangan HIV/AIDS	2	2	-	-	-	
				Tersusunnya laporan peningkatan kapasitas SDM	Jumlah laporan peningkatan kapasitas SDM	1	1	-	-	-	
				Tersusunnya dokumen laporan penyebarluasan informasi tentang HIV/AIDS	Jumlah laporan penyebarluasan informasi tentang HIV/AIDS	1	1	-	-	-	

Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Penanggung jawab Kegiatan
KL	Program	Kegiatan				Rencana 2015	Prakiraan Maju				
							2016	2017	2018	2019	
036	06			Pelayanan Kesekretariatan	Layanan Kesekretariatan	12 bln	12 bln	-	-	-	Asdep Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
				Tersedianya alat pengolah data pendukung tupoksi	Jumlah paket pengolah data dan informasi	1	1	-	-	-	
		2564	Koordinasi kebijakan pemenuhan hak dan perlindungan anak	Tersusunnya URK di bidang Pemenuhan hak dan perlindungan Anak	Jumlah URK di bidang Pemenuhan hak dan perlindungan anak	2	2	3	3	3	Asdep Pemenuhan Hak dan perlindungan Anak
		2565	Koordinasi Kebijakan Penanganan Kemiskinan	Tersusunnya URK di bidang Penanganan Kemiskinan	Jumlah URK di bidang Penanganan Kemiskinan	2	2	3	3	3	Asdep Penanganan Kemiskinan

Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Penanggung jawab Kegiatan
KL	Program	Kegiatan				Rencana 2015	Prakiraan Maju				
							2016	2017	2018	2019	
036	06	2565	Koordinasi Kebijakan Penanganan Kemiskinan	Tersusunnya dokumen Program dan administratif kegiatan di bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial	Jumlah Dokumen Program dan Adminsitratif Kegiatan di bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial	2	2	2	2	2	Asdep Penanganan Kemiskinan
		2566	Koordinasi penanganan masalah-masalah strategis bidang PMK	Tersusunnya Laporan hasil koordinasi masalah strategis bidang PMK	Jumlah laporan hasil kegiatan koordinasi masalah strategis bidang PMK	9	9	3	3	3	Kepala Biro Perencanaan dan KLN
		2568	Penataan kelembagaan jaminan sosial (SJSN)	Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi(MONEV) Program jaminan Sosial	Tersedianya Sistem (MONEV) Terpadu Jaminan Kesehtan	1	1	1	1	1	Sekretaris DJSN

Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Penanggung jawab Kegiatan
KL	Program	Kegiatan				Rencana 2015	Prakiraan Maju				
							2016	2017	2018	2019	
036	06	2568	Penataan kelembagaan jaminan sosial (SJSN)	Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi(MONEV) Program jaminan Sosial Secara Terpadu	Tersedianya Sistem (MONEV) Jaminan Sosial Ketenaga Kerjaan	1	1	1	1	1	Sekretaris DJSN
					Jumlah Dokumen (MONEV) Terpadu SJSN bidang Kesehatan	2	2	2	2	2	
					Jumlah Dokumen (MONEV) Terpadu SJSN bidang Ketenaga Kerjaan	2	2	2	2	2	

Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Penanggung jawab Kegiatan
KL	Program	Kegiatan				Rencana 2015	Prakiraan Maju				
							2016	2017	2018	2019	
036	06	2568	Penataan kelembagaan jaminan sosial (SJSN)	Tersusunnya Perangkat hukum pendukung implementasi SJSN	Jumlah draft peraturan pelaksanaan SJSN	6	6	6	4	4	Sekretaris DJSN
				Tersusunnya Studi dan Kajian di Bidang Jaminan Sosial untuk memperkuat pelaksanaan	Jumlah dokumen Kajian kebijakan SJSN	5	5	5	5	5	
				Terlaksananya sosialisasi SJSN	Jumlah pelaksanaan sosialisasi dalam bentuk penyuluhan, pameran, foum komunikasi dan kerjasama	6	6	6	6	6	

Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Penanggung jawab Kegiatan
KL	Program	Kegiatan				Rencana 2015	Prakiraan Maju				
							2016	2017	2018	2019	
036	06	5642	Koordinasi kebijakan Pendidikan Tinggi dan Pemanfaatan IPTEK	Tersusunnya URK di bidang Pendidikan Tinggi dan Pemanfaatan IPTEK	Jumlah URK di bidang Pendidikan Tinggi dan Pemanfaatan IPTEK	2	2	3	3	3	Asdep Pendidikan Tinggi dan Pemanfaat-an IPTEK

Matriks 7 Kerangka Pendanaan

Kode			Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Alokasi (Rp. Juta)				
						Rencana	Prakiraan Maju			
KL	Program	Kegiatan				2015	2016	2017	2018	2019
036	01	-	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko PMK	Terselenggaranya dukungan pelayanan perkantoran dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi koordinasi secara tertib administrasi dan mendukung sepenuhnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemenko PMK	-	142.497.2	149.216.0	134.206.8	134.206.8	147.627.5
					Prosentase tersosialisasikannya kebijakan/ kegiatan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan melalui media	100%	100%	100%	100%	100%
					Tersedianya laporan hasil pemeriksaan	11	11	16	16	16
					Prosentase Pengelolaan keuangan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%

Kode			Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Alokasi (Rp. Juta)				
						Rencana	Prakiraan Maju			
KL	Program	Kegiatan				2015	2016	2017	2018	2019
036	01	-			Prosentase terpenuhinya sarpras mendukung pelaksanaan operasional perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%
					Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi sesuai jabatan	207	207	-	-	-
					Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan	8	8	11	11	11
					Jumlah kajian kebijakan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan	5	5	5	5	5

Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Alokasi (Rp. Juta)				
						Rencana 2015	Prakiraan Maju			
KL	Program	Kegiatan					2016	2017	2018	2019
036	01	2530	Peningkatan dan Pengelolaan Urusan Informasi dan Persidangan	-	-	6.602.0	6.756.9	6.756.9	6.756.9	7.432.6
				Terwujudnya bahan persidangan, pencatatan persidangan dan pelaporan hasil persidangan yang cepat dan menyeluruh	Jumlah bahan dan hasil persidangan yang dicapai dengan lengkap dan menyeluruh	908.0	884.0	983.0	1,283.0	1,293.0
				Tersosialisasi dan terdokumentasinya kebijakan/ kegiatan di berbagai media	Jumlah sosialisasi kebijakan/kegiatan Kemenko PMK di media cetak	3,950.5	3,802.0	4,350.9	4,350.9	4,350.9

Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Alokasi (Rp. Juta)				
						Rencana	Prakiraan Maju			
KL	Program	Kegiatan				2015	2016	2017	2018	2019
036	01	2530		Terwujudnya dokumen hukum, perangkat organisasi dan tatalaksana dengan tepat waktu	Jumlah dokumen kebijakan/ kegiatan	150.2	235.6	235.6	235.6	235.6
					Jumlah dokumen hukum, perangkat organisasi, dan tata laksana dengan tepat waktu	684.3	818.0	935.0	953.0	953.0
					Jumlah dokumen bidang hukum	116.5	117.0	117.0	117.0	117.0
				Meningkatnya pengelolaa data dan sistem informasi di bidang PMK	Pelayanan sistem pengelolaan data dan informasi di Kemenko PMK	792.5	900.3	1,000.5	1,000.5	1,000.5

Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Alokasi (Rp. Juta)				
						Rencana	Prakiraan Maju			
KL	Program	Kegiatan				2015	2016	2017	2018	2019
036	01	2531	Penyelenggaraan Penyusunan Program dan Anggaran, Penyusunan Data Pelaporan dan Administrasi Kln	-	-	8.293.0	6.478.6	6.478.5	6.478.5	7.126.4
				Terwujudnya perencanaan program/kegiatan dan anggaran yang berkualitas di lingkungan kemenko PMK	Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran	1,329.6	2,609.0	2,000.0	2,282.0	2,282.0
					Tersedianya dokumen peningkatan perencanaan bidang PMK	3,731.8	519.0	300.0	300.0	300.0
				Meningkatkny a monitoring dan evaluasi di lingkungan kemenko PMK	Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi kegiatan PMK	1,074.2	1,600.0	900.0	900.0	1,000.0
					Tersediannya dokumen pelaporan bidang PMK	525.5	370.0	362.0	362.0	362.0

Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Alokasi (Rp. Juta)				
						Rencana	Prakiraan Maju			
KL	Program	Kegiatan				2015	2016	2017	2018	2019
036	01	2531			Tersediannya dokumen pelaporan bidang PMK	525.5	370.0	362.0	362.0	362.0
				Terwujudnya peningkatan dan pengembangan kerjasama luar negeri	Tersedianya dokumen perjanjian/ kerjasama international	217.0	280.0	200.0	200.0	200.0
					Tersedianya Jumlah dokumen peningkatan kerjasama LN	1,413.9	1,100.0	700.0	700.0	700.0

Kode			Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Alokasi (Rp. Juta)				
						Rencana 2015	Prakiraan Maju			
KL	Program	Kegiatan					2016	2017	2018	2019
036	01	2532	Peningkatan dan Pengelolaan Pelayanan Umum	-	-	94.835,29	111.669,37	110.075,60	110.075,60	121.083,16
				Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan	Tersedianya dokumen laporan kegiatan pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian anggaran	1,111.0	3,600.0	3,900.0	3,900.0	3,900.0
				Peningkatan Kualitas SDM Pegawai Kemenko PMK	Jumlah pegawai yang memenuhi persyaratan jabatan berdasarkan kompetensi	2,215.1	4,957.0	5,157.0	5,457.0	5,457.0
				Terselenggaranya layanan perkantoran	Dukungan layanan perkantoran , ketatausahaan, protokoler dan kunjungan pimpinan serta pelaporan keuangan	90,693.0	92,574.5	97,370.0	101,985.0	101,985.0

Kode			Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Alokasi (Rp. Juta)				
KL	Program	Kegiatan				Rencana 2015	Prakiraan Maju			
							2016	2017	2018	2019
036	01	2532		Terselenggaranya pengelolaan administrasi dan kearsipan yang baik	Jumlah pengelolaan administrasi dan kearsipan	815.0	3,700.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0
		2533	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Kemenko PMK	-	-	720.0	1.016.3	1.016.3	1.016.3	1.117.9
				Penguatan akuntabilitas keuangan dan kinerja kemenko PMK	Tersedianya laporan hasil pemeriksaan	334.1	334.1	334.1	334.1	334.1
					Tersedianya loporan pengawasan atas pelaksanaan anggaran	317.2	616.0	500.0	500.0	500.0
				Terciptanya inspektorat yang professional dan handal mendukung terlaksananya wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di	Jumlah auditor yang kompeten dan bersertifikat sesuai jenjang jabatan dan keahlian	68.6	65.9	65.9	65.9	65.9

Kode			Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Alokasi (Rp. Juta)				
						Rencana	Prakiraan Maju			
KL	Program	Kegiatan				2015	2016	2017	2018	2019
036	01	2535	Koordinasi Kajian Bidang Pembangunan manusia dan kebudayaan	-	-	2.785.0	2.736.5	2.500.0	2.500.0	2.750.0
				Tersusunnya kajian bidang pembangunan manusia dan kebudayaan	Jumlah Dokumen Kajian Bidang PMK	2.785.0	2.736.5	2.500.0	2.500.0	2.750.0
		2534	Penyelenggaraan Pembinaan Korpri Kemenko PMK	-	-	526.0	538.0	500.0	500.0	500.0
				Terselenggaranya pembinaan korpri kemenko PMK	Tersedianya laporan hasil penyelenggaran pembinaan korpri	526.0	538.0	500.0	500.0	500.0
		2567	Pembangunan/Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana	-	-	28.735.9	20.558.2	7.379.3	7.379.3	8.117.3

Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Alokasi (Rp. Juta)				
						Rencana	Prakiraan Maju			
KL	Program	Kegiatan				2015	2016	2017	2018	2019
036	01	2567		Terwujudnya sarana dan prasarana perkantoran mendukung tugas dan funsi Kemenko PMK	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	17,016.6	14,463.0	8,934.0	9,506.0	10,506.0
					Tesersdianya peralatan danfasilitas perkantoran	8,830.7	3,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0
					Tersedianya kendaraan dinas pendukung tupoksi	2,888.7	3,095.6	3,800.0	3,800.0	3,800.0
036	06	-	Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	-	-	153.339.0	338.162.3	247.328.3	248.793.1	273.672.4

Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Alokasi (Rp. Juta)				
						Rencana 2015	Prakiraan Maju			
KL	Program	Kegiatan					2016	2017	2018	2019
036	06	-		Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan	Jumlah RK Mendukung Pelayanan Dasar, Kebutuhan Dasar, Pemberdayaan dan Gotong Royong di Bidang Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana yang dihasilkan	4	4	4	4	4
					Jumlah RK Mendukung Pelayanan Dasar, Kebutuhan Dasar, Pemberdayaan dan Gotong Royong di Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial yang dihasilkan	4	4	4	4	4

Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Alokasi (Rp. Juta)				
						Rencana	Prakiraan Maju			
KL	Program	Kegiatan				2015	2016	2017	2018	2019
036	06	-			Jumlah RK Mendukung Pelayanan Dasar, Kebutuhan Dasar, Pemberdayaan dan Gotong Royong di Bidang Peningkatan Kesehatan yang dihasilkan	4	4	4	4	4
					Jumlah RK Mendukung Pelayanan Dasar, Kebutuhan Daspar, Pemberdayaan dan Gotong Royong di Bidang Pendidikan dan Agama yang dihasilkan	5	5	5	5	5

Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Alokasi (Rp. Juta)				
						Rencana 2015	Prakiraan Maju			
KL	Program	Kegiatan					2016	2017	2018	2019
036	06	-			Jumlah RK Mendukung Pelayanan Dasar, Kebutuhan Dasar, Pemberdayaan dan Gotong Royong di Bidang Kebudayaan yang dihasilkan	4	4	4	4	4
					Jumlah RK Mendukung Pelayanan Dasar, Kebutuhan Dasar, Pemberdayaan dan Gotong Royong di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak yang dihasilkan	4	4	4	4	4

Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Alokasi (Rp. Juta)				
						Rencana 2015	Prakiraan Maju			
KL	Program	Kegiatan					2016	2017	2018	2019
036	06	-			Jumlah RK Mendukung Pelayanan Dasar, Kebutuhan Dasar, Pemberdayaan dan Gotong Royong di Bidang Pemberdayaan Masyarakat, desa dan Kawasan yang dihasilkan	4	4	4	4	4
036	06	2536	Koordinasi Kebijakan Penanganan Pasca Bencana	-	-	3.512.0	3.234.5	2.150.0	2.150.0	2.365.0
				Tersusunnya usulan rekomendasi kebijakan (URK) di bidang Penanganan Pasca bencana	Jumlah URK di bidang Penanganan Pasca bencana	3.512.0	3.234.5	2.150.0	2.150.0	2.365.0

Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Alokasi (Rp. Juta)				
						Rencana 2015	Prakiraan Maju			
KL	Program	Kegiatan					2016	2017	2018	2019
036	06	2537	Koordinasi kebijakan pengurangan resiko bencana	-	-	4.612.0	6.251.3	15.250.0	15.250.0	16.775.0
				Tersusunnya URK di bidang Pengurangan Resiko Bencana	Jumlah URK di bidang Pengurangan Resiko Bencana	-	2,501.3	4,000.0	4,100.0	4,400.0
			Tersusunnya dokumen Program dan administratif kegiatan di bidang Kerawanan sosial dan Dampak Bencana	Jumlah Dokumen Program dan Adminsitratif Kegiatan di Bidang Kerawanan sosial dan Dampak Bencana	-	750.0	750.0	750.0	750.0	750.0
			Terselenggarany a Kegiatan Ekspedisi NKRI	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan kegiatan Ekspedisi NKRI	-	-	12,000.0	13,000.0	14,000.0	14,000.0

Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Alokasi (Rp. Juta)				
						Rencana 2015	Prakiraan Maju			
KL	Program	Kegiatan					2016	2017	2018	2019
036	06	2538	Koordinasi kebijakan Pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama	-	-	1.030.0	2.559.3	1.950.0	1.950.0	2.145.0
				Tersusunnya URK di bidang Pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama	Jumlah URK di bidang Pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama	1.030.0	2.559.3	1.950.0	1.950.0	2.145.0
		2539	Koordinasi kebijakan Pembinaan Umat Beragama, Pendidikan Agama dan Keagamaan	-	-	1.265.0	2.900.0	1.950.0	1.950.0	2.145.0
				Tersusunnya URK di bidang Pembinaan Umat Beragama, Pendidikan Agama dan Keagamaan	Jumlah URK di bidang Pembinaan Umat Beragama, Pendidikan Agama dan Keagamaan	1.265.0	2.900.0	1.950.0	1.950.0	2.145.0
		2540	Koordinasi Kebijakan Tanggap Cepat Bencana	-	-	2.115.0	2.637.3	2.200.0	2.200.0	2.420.0
				Tersusunnya URK di bidang Tanggap Cepat Bencana	Jumlah URK di bidang Tanggap Cepat Bencana	2.115.0	2.637.3	2.200.0	2.200.0	2.420.0

Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Alokasi (Rp. Juta)				
KL	Program	Kegiatan				Rencana 2015	Prakiraan Maju			
							2016	2017	2018	2019
036	06	2540	Koordinasi Kebijakan Tanggap Cepat Bencana	-	-	2.115.0	2.637.3	2.200.0	2.200.0	2.420.0
				Tersusunnya URK di bidang Tanggap Cepat Bencana	Jumlah URK di bidang Tanggap Cepat Bencana	2.115.0	2.637.3	2.200.0	2.200.0	2.420.0
		2541	Koordinasi Kebijakan Jaminan Sosial	-	-	2.339.0	2.884.7	2.130.0	2.130.0	2.343.0
				Tersusunnya URK di bidang jaminan sosial	Jumlah URK di bidang Jaminan Sosial	2.339.0	2.884.7	2.130.0	2.130.0	2.343.0
		2542	Koordinasi kebijakan warisan budaya	-	-	3.439.0	3.682.0	5.900.0	5.900.0	6.490.0
				Tersusunnya URK di bidang Warisan Budaya	Jumlah URK di bidang Warisan Budaya	2,939.1	3.682.0	5.900.0	5.900.0	6.490.0
				Terselenggaranya Kegiatan Pekan Produk Budaya Indonesia (PPBI)	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan kegiatan PPBI	-	1,749.8	1,200.0	1,300.0	1,400.0
				Tersosialisasinnya kegiatan revolusi mental kepada Masyarakat	Jumlah Laporan hasil sosialisasi & Komunkasi Publik Kegiatan Revolusi Mental	109,600.0	-	-	-	-

Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Alokasi (Rp. Juta)				
						Rencana	Prakiraan Maju			
KL	Program	Kegiatan				2015	2016	2017	2018	2019
036	06	2543	Koordinasi Kebijakan Pemberdayaan kawasan strategis dan khusus	-	-	14.547.0	9.980.6	1.950.0	1.950.0	2.145.0
				Tersusunnya URK di bidang Pemberdayaan kawasan strategis dan khusus	Jumlah URK di bidang Pemberdayaan kawasan strategis dan khusus	2,797.0	2,980.6	4,200.0	4,100.0	4,000.0
				Terselenggara nya kegiatan Bhakti Kesra Nusantara	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan kegiatan Bhakti Kesra Nusantara	12,000.0	12,000.0	-	-	-
		2544	Koordinasi kebijakan Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan	-	-	1,440.0	0	0	0	0
				Tersusunnya URK dibidang pemberdayaan masyarakat pembangunan desa dan kawasan perdesaan	Jumlah URK di bidang pemberdayaan masyarakat, Pembangunan desa dan kawasan perdesaan	1,440.0	0	0	0	0

Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Alokasi (Rp. Juta)				
						Rencana	Prakiraan Maju			
KL	Program	Kegiatan				2015	2016	2017	2018	2019
036	06	2545	Koordinasi Kebijakan ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-	1.650.0	2.420.3	2.950.0	2.950.0	3.245.0
				Tersusunnya URK ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah URK di bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	1,670.3	1,800.0	1,900.0	2,200.0
				Tersusunnya dokumen Program dan administratif kegiatan di bidang Perlindungan perempuan dan anak	Jumlah dokumen Program dan Adminsitratif Kegiatan di bidang Perlindungan perempuan dan anak	-	750.0	750.0	750.0	750.0
		2546	Koordinasi Kebijakan Kependudukan dan KB	-	-	1.584.0	1.882.5	1.950.0	1.950.0	2.145.0
				Tersusunnya URK di bidang kependudukan dan KB	Jumlah URK di bidang kependudukan dan KB	1.584.0	1.882.5	1.950.0	1.950.0	2.145.0

Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Alokasi (Rp. Juta)				
						Rencana	Prakiraan Maju			
KL	Program	Kegiatan				2015	2016	2017	2018	2019
036	06	2547	Koordinasi Kebijakan Pemberdayaan perempuan	-	-	1.800.0	2.478.6	1.950.0	1.950.0	2.145.0
				Tersusunnya URK dibidang Pemberdayaan Perempuan	Jumlah URK di bidang pemberdayaan perempuan	1.800.0	2.478.6	1.950.0	1.950.0	2.145.0
		2548	Koordinasi Kebijakan Pemberdayaan kawasan perdesaan	-	-	1.977.0	2.248.6	1.950.0	1.950.0	2.145.0
				Tersusunnya URK di bidang Pemberdayaan kawasan perdesaan kawasan perdesaan	Jumlah URK di bidang Pemberdayaan kawasan perdesaan	1.977.0	2.248.6	1.950.0	1.950.0	2.145.0
		2549	Koordinasi kebijakan Kompensasi Sosial	-	-	4.673.0	4.875.5	3.100.0	3.100.0	3.410.0
				Tersusunnya URK di bidang Kompensasi Sosial	Jumlah URK di bidang Kompensasi Sosial	4.673.0	4.875.5	3.100.0	3.100.0	3.410.0
		2550	Koordinasi Kebijakan Konflik Sosial	-	-	3.973.0	3.566.7	2.700.0	2.700.0	2.970.0
				Tersusunnya URK di bidang Konflik Sosial	Jumlah URK di bidang Konflik Sosial	3.973.0	3.566.7	2.700.0	2.700.0	2.970.0

Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Alokasi (Rp. Juta)				
KL	Program	Kegiatan				Rencana 2015	Prakiraan Maju			
							2016	2017	2018	2019
036	06	2551	Koordinasi Kebijakan Pemenuhan hak dan perlindungan perempuan	-	-	8.650.0	9.822.8	1.950.0	1.950.0	2.145.0
				Tersusunnya URK di bidang Pemenuhan hak dan perlindungan Perempuan	Jumlah URK di bidang Pemenuhan hak dan perlindungan perempuan	8.650.0	9.822.8	1.950.0	1.950.0	2.145.0
		2552	Koordinasi Kebijakan Ketahanan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak dan Kesehatan Lingkungan	-	-	1.494.0	2.401.8	2.950.0	2.950.0	3.245.0
				Tersusunnya URK di bidang Ketahanan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak dan Kesehatan Lingkungan	Jumlah URK di bidang Ketahanan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak dan Kesehatan Lingkungan	-	1,512.5	2,350.0	2,450.0	2,550.0
				Tersusunnya dokumen Program dan administratif kegiatan di bidang Peningkatan Kesehatan	Jumlah Dokumen Program dan Adminsitratif Kegiatan di bidang Peningkatan kesehatan	-	750.0	750.0	750.0	750.0

Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Alokasi (Rp. Juta)				
						Rencana 2015	Prakiraan Maju			
KL	Program	Kegiatan					2016	2017	2018	2019
036	06	2553	Koordinasi kebijakan keolahragaan	-	-	1.551.0	1.598.8	2.805.1	2.805.1	3.085.6
				Tersusunnya URK di bidang keolahragaan	Jumlah URK di bidang keolahragaan	1.551.0	1.598.8	2.805.1	2.805.1	3.085.6
		2554	Koordinasi kebijakan Nilai dan Kreativitas Budaya	-	-	8.384.0	186.407.3	133.050.0	133.050.0	146.355.0
				Tersusunnya URK di bidang Nilai dan Kreativitas Budaya	Jumlah URK di bidang Nilai dan Kreativitas Budaya	2,532.6	2,320.1	2,000.0	2,300.0	3,500.0
				Terselenggaranya Kegiatan Pekan Produk Budaya Indonesia (PPBI)	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan kegiatan PPBI	1,749.9	-	-	-	-
				Tersosialisasinya kegiatan Revolusi Mental kepada Masyarakat	Jumlah Laporan hasil sosialisasi & Komunikasi Publik Kegiatan Revolusi Mental	-	109,600.0	200,000.0	200,000.0	200,000.0
				Terselenggaranya kegiatan Sail	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Sail	6,101.4	-	-	-	-

Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Alokasi (Rp. Juta)				
						Rencana 2015	Prakiraan Maju			
KL	Program	Kegiatan					2016	2017	2018	2019
036	06	2555	Koordinasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan	-	-	1.440.0	1.705.8	1.950.0	1.950.0	2.145.0
				Tersusunnya URK di bidang Pelayanan Kesehatan	Jumlah URK di bidang Pelayanan Kesehatan	1.440.0	1.705.8	1.950.0	1.950.0	2.145.0
		2556	Koordinasi Kebijakan Pemberdayaan Disabilitas dan lanjut usia	-	-	1.458.0	1.874.5	1.750.0	1.750.0	1.925.0
				Tersusunnya URK di bidang Disabilitas dan lanjut usia	Jumlah URK di bidang Pemberdayaan Disabilitas dan lanjut usia	1.458.0	1.874.5	1.750.0	1.750.0	1.925.0
		2557	Koordinasi Kebijakan Kepemudaan	-	-	1.055.0	3.092.3	2.950.0	2.950.0	3.245.0
				Tersusunnya URK di bidang kepemudaan	Jumlah URK di bidang kepemudaan	-	1,129.5	1,450.0	1,450.0	1,450.0
				Tersusunnya dokumen Program dan administratif kegiatan di bidang Kebudayaan	Jumlah Dokumen Program dan Adminsitratif Kegiatan di bidang Kebudayaan	-	750.0	750.0	750.0	750.0

Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Alokasi (Rp. Juta)				
KL	Program	Kegiatan				Rencana 2015	Prakiraan Maju			
							2016	2017	2018	2019
036	06	2558	Koordinasi kebijakan PAUD, DIKDAS dan Pendidikan Masyarakat	-	-	8.712.0	2.500.0	1.950.0	1.950.0	2.145.0
				Tersusunnya URK di bidang PAUD, DIKDAS dan Pendidikan Masyarakat	Jumlah URK di bidang PAUD, DIKDAS dan Pendidikan Masyarakat	8.712.0	2.500.0	1.950.0	1.950.0	2.145.0
		2559	Koordinasi kebijakan Pendidikan Menengah dan Keterampilan Bekerja	-	-	1.155.0	3.415.6	2.950.0	2.950.0	3.245.0
				Tersusunnya URK di bidang Pendidikan Menengah dan Keterampilan	Jumlah URK di bidang Pendidikan Menengah dan Keterampilan Bekerja	2.286.0	4.246.8	3.200.0	3.200.0	3.520.0
				Tersusunnya dokumen Program dan administratif kegiatan di bidang Pendidikan dan Agama	Jumlah Dokumen Program dan Adminsitratif Kegiatan di bidang Pendidikan dan Agama	2.152.0	4.350.0	2.950.0	2.950.0	3.245.0

Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Alokasi (Rp. Juta)				
						Rencana	Prakiraan Maju			
KL	Program	Kegiatan				2015	2016	2017	2018	2019
036	06	2559		Tersusunnya dokumen Program dan administratif kegiatan di bidang Pendidikan dan Agama	Jumlah Dokumen Program dan Adminsitratif Kegiatan di bidang Pendidikan dan Agama	2.152.0	4.350.0	2.950.0	2.950.0	3.245.0
		2560	Koordinasi Kebijakan Pemberdayaan desa	-	-	2.536.0	2.614.7	1.950.0	2.500.0	2.600.0
				Tersusunnya URK di bidang Pemberdayaan Desa	Jumlah URK di bidang Pemberdayaan Desa	-	2.614.7	1.950.0	2.500.0	2.600.0
		2561	Koordinasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat	-	-	2.402.0	2.970.8	2.950.0	2.050.0	2.150.0
				Tersusunnya URK di bidang Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah URK di bidang Pemberdayaan Masyarakat	-	2.220.8	1.950.0	1.300.0	1.400.0
				Tersusunnya dokumen Program dan administratif kegiatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan	Jumlah Dokumen Program dan Adminsitratif Kegiatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan	-	750.0	1.000.0	750.0	750.0

Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Alokasi (Rp. Juta)				
						Rencana	Prakiraan Maju			
KL	Program	Kegiatan				2015	2016	2017	2018	2019
036	06	2562	Koordinasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan penyakit	-	-	5.468.0	5.987.6	5.450.0	5.450.0	5.995.0
				Tersusunnya URK dibidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	Jumlah URK bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	3,815.9	4,815.3	5.450.0	5.450.0	5.995.0
				Terselenggaranya layanan operational secretariat Zoonosis	Layanan operasional sekretariat	1,902.1	974.3	-	-	-
		2563	Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS	-	-	19,000.0	19,000.0	-	-	-
				Tersusunnya URK kebijakan bidang pencegahan dan penanggulangan HIV/ AIDS	Jumlah URK di bidang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS	114.2	180.0	-	-	-
				Tersusunnya dokumen perencanaan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS	Jumlah dokumen perencanaan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS	100.9	167.8	-	-	-

Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Alokasi (Rp. Juta)				
KL	Program	Kegiatan				Rencana 2015	Prakiraan Maju			
							2016	2017	2018	2019
036	06	2563		Tersusunnya dokumen laporan nasional penanggulangan HIV/AIDS	Jumlah dokumen laporan nasional penanggulangan HIV/AIDS	9,742.8	9,809.8	-	-	-
				Tersusunnya laporan peningkatan kapasitas SDM	Jumlah dokumen laporan peningkatan kapasitas SDM	3,142.2	3,209.2	-	-	-
				Tersusunnya dokumen laporan penyebarluasan informasi tentang HIV/AIDS	Jumlah dokumen laporan penyebarluasan informasi tentang HIV/AIDS	2,713.0	2,509.0	-	-	-
				Pelayanan Kesekretariatan	Layanan Kesekretariatan	2,713.5	2,509.0	-	-	-
				Tersedianya alat pengolah data pendukung tupoksi	Jumlah paket pengolah data dan informasi	473.2	615.2	-	-	-

Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Alokasi (Rp. Juta)				
KL	Program	Kegiatan				Rencana 2015	Prakiraan Maju			
							2016	2017	2018	2019
036	06	2564	Koordinasi kebijakan Pemenuhan hak dan Perlindungan Anak	-	-	1.504.0	2.425.6	1.950.0	1.950.0	2.145.0
				Tersusunnya URK di bidang Pemenuhan hak dan Perlindungan Anak	Jumlah URK di bidang Pemenuhan hak dan Perlindungan Anak	1.504.0	2.425.6	1.950.0	1.950.0	2.145.0
		2565	Koordinasi Kebijakan Penanganan Kemiskinan	-	-	1.865.0	2.998.9	3.820.0	3.820.0	4.202.0
				Tersusunnya URK di bidang Penanganan Kemiskinan	Jumlah URK di bidang Penanganan Kemiskinan	-	750.0	750.0	750.0	750.0
				Tersusunnya dokumen Program dan administratif kegiatan di bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial	Jumlah Dokumen Program dan Adminsitratif Kegiatan di bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial	17.625.0	7.536.3	6.288.7	6.288.7	6.917.6
		2566	Koordinasi penanganan masalah- masalah strategis bidang PMK	-	-	17.625.0	7.536.3	6.288.7	6.288.7	6.917.6
				Tersusunnya Laporan hasil koordinasi masalah strategis bidang PMK	Jumlah laporan hasil kegiatan koordinasi masalah strategis bidang PMK	19.584.0	25.224.9	21.334.4	22.799.2	25.079.1

Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Alokasi (Rp. Juta)				
						Rencana	Prakiraan Maju			
KL	Program	Kegiatan				2015	2016	2017	2018	2019
036	06	2568	Penataan kelembagaan jaminan sosial (SJSN)	-	-	-	25.224	21.334	21.600	23.400
				Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Program jaminan Sosial Secara Terpadu	Tersedianya Sistem MONEV Terpadu Jaminan Kesehatan Nasional dan Ketenagakerjaan	-	-	-	-	-
					Jumlah Dokumen MONEV Terpadu SJSN bidang Kesehatan dan Ketenagakerjaan	-	9.276	10.303	15.237	17.100
				Tersusunnya Perangkat hukum pendukung implementasi SJSN	Jumlah draft peraturan pelaksanaan SJSN	-	2.884	-	-	-
				Tersusunnya Studi dan Kajian di Bidang Jaminan Sosial untuk memperkuat pelaksanaan SJSN	Jumlah dokumen Kajian kebijakan SJSN	-	3.028	-	-	-
				Terlaksananya sosialisasi SJSN	Jumlah pelaksanaan sosialisasi dalam bentuk penyuluhan , pameran, forum komunikasi dan kerjasama	-	2.551	-	-	-

Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Alokasi (Rp. Juta)				
						Rencana	Prakiraan Maju			
KL	Program	Kegiatan				2015	2016	2017	2018	2019
036	06	2568		Terselenggaranya layanan perkantoran pendukung sekretariat	Jumlah bulan layanan umum pendukung tupoksi	-	-	-	-	-
		5642	Koordinasi kebijakan Pendidikan Tinggi dan Pemanfaatan IPTEK	-	-	-	2.516.4	1.950.0	1.950.0	2.145.0
				Tersusunnya URK di bidang Pendidikan Tinggi dan Pemanfaatan IPTEK	Jumlah URK di bidang Pendidikan Tinggi dan Pemanfaatan IPTEK	-	2.516.4	1.950.0	1.950.0	2.145.0
TOTAL						295.836.1	481.078.3	381.535.1	382.999.9	421.299.9

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PUAN MAHARANI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Y. B. Satya Sananugraha